

**INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH SERTA  
PENGARUHNYA TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH  
PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :  
**NOVATUL ISROWIYAH**  
**NIM 1505036037**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Rahman El Junusi, SE., MM.  
NIP. 19691118 200003 1 001

Warno, SE., M.Si  
NIP. 19830721 201503 1 002

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri Novatul Isrowiyah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebelumnya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Novatul Isrowiyah

Nomor Induk : 1505036037

Judul : Indeks Inklusi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap  
Pembiayaan Syariah Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah di Indonesia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Agustus 2019

Pembimbing I



Rahman El Junusi, SE., MM.

Pembimbing II



Warno, SE., M.Si





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7608454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Indeks Inklusi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia**

Penulis : Novatul Isrowiyah

NIM : 1505036037

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikate Cumlaude pada tanggal:

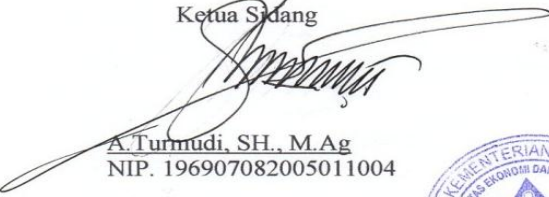
**04 September 2019**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2019/2020.

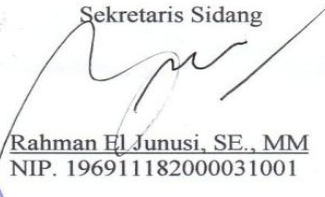
Semarang, 09 September 2019

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

  
A. Turmudi, SH., M.Ag  
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang

  
Rahman El Junusi, SE., MM  
NIP. 196911182000031001

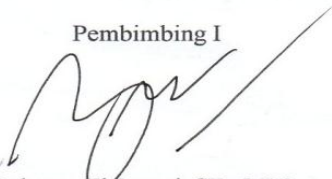
Penguji I

  
Dr. Ari Kristin P., M.Si  
NIP. 197905122005012004


Penguji II

  
Muchammad Fauzi, SE., MM  
NIP. 197302172006041001

Pembimbing I

  
Rahman El Junusi, SE., MM  
NIP. 196911182000031001

Pembimbing II

  
Warno, SE., M.Si  
NIP. 198307212015031002





## MOTTO

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

“Apa saja kebaikan yang kamu peroleh itu dari Allah, dan apa saja  
keburukan yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu  
sendiri”

(Qs. an-Nisa [4] : 79)

*“While we may not be able to control all that happens to us, we  
can control what happen inside us”*

**~Benjamin Franklin~**





## PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT Dzat yang Maha Agung, Dzat yang menyayangi makhluknya tanpa syarat, Dzat yang melimpahkan nikmat dan rahmatNya kepada makhluk semesta alam. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, tuntunan kami di dunia dan pemberi syaa'at kelak di akhirat.

Terimakasih atas motivasi, dukungan dan doa dari semua pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ibu Masrifah dan Bapak Radi. Rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan. Segala cinta, kasih sayang dan dukungan yang engkau curahkan kepadaku tak bisa terbalas dengan apapun di dunia ini. Dengan ilmu, kalian memberiku bekal yang sangat berharga dalam kehidupanku ini. Aku tahu ibu, bapak, dengan memberiku bekal seberharga ini kalian sangat bersusah payah, penuh perjuangan dan keluh kesah. semoga perjuangan ini dapat menjadi amal yang tiada terputus pahalanya sampai akhir zaman.
2. Teruntuk Emakku tersayang, Solikah, wanita hebat yang telah membesarkanku, mendidiku sejak kecil, mencurahkan cinta dan kasih sayang tulusnya tanpa pamrih. Semoga Allah senantiasa memuliakan dan melimpahkan kebaikan kepadamu, semoga Allah mempermudah jalanku untuk selalu membahagiakanmu.
3. Kakak-kakak, adik, keluarga besar dan orang-orang terdekatku. Kupersembahkan kepada Mba Yun dan Bang

Mumy, Mas Arif dan Mba Amel, Adik Nofy, Asyhar dan Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat dan dukungan untuk segala hal. terimakasih atas dukungan kalian selama ini, semoga Allah senantiasa meliputi kalian semua dengan keberlimpahan dan kebahagiaan.

4. Dosen pembimbingku Pak Rahman dan Pak Warno, terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya. Semoga kebaikan beliau diberikan balasan yang terbaik disisi Allah.
5. Teman-temanku semua, terutama Rezky, Dwi, Dewi, Laely dan teman-teman PBAS-A, teman-teman Bidikmisiku angkatan 2015 khususnya Pak Amir, teman-teman KMPP, teman-teman IKMI, teman-teman KKN Posko 65 dan teman magang BRISyariah. terimakasih kawanku, atas semangat dan motivasinya. Kalian telah memberikan hal yang tak terlupakan dan menjadi bagian dari cerita hidupku.
6. Terimakasih untuk semua orang yang telah mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini tanpa ku ketahui. Semoga ketulusan kalian diberikan balasan oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Terimakasih semuanya...



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 26 Agustus 2019

Deklarator,



Novatul Isrowiyah

NIM. 1505036037



## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin kedalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya  
الطَّبَّ al-thibb.

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al- ... misalnya الصَّنْعَة =  
al-shina'ah. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak  
pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya  
المَعِيشَةُ الطَّبِيعِيَّة = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia dengan menggunakan data sekunder perbankan syariah pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018. Penelitian ini menghitung dan menganalisis indeks inklusi keuangan syariah yang mencakup tiga dimensi; *aksesibilitas*, *availabilitas*, dan *usage* perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia tergolong rendah selama periode penelitian dan provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang paling inklusif di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menggunakan metode sampling jenuh, total 33 provinsi di Indonesia dipilih sebagai sampel dengan periode observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM.

**KataKunci:** Inklusi keuangan syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah UMKM





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMBIAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA”. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan perbankan syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Saifullah, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah dan HenyYuningrum, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah sabar membimbing, menasehati, mengarahkan, dan mengurus segala keperluan akademik seluruh mahasiswa jurusan S1 perbankan syariah.

4. Dr. H. Musahadi, M.Ag., selaku dosen wali yang telah sabar mendengar keluhan, memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di universitas.
5. Rahman El Junusi, SE., MM., selaku dosen pembimbing I dan Warno, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta membekali penulis dengan berbagai pengalaman.
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah melayani dan membantu penulis untuk segala keperluan akademik selama perkuliahan.
8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semoga semua amal baik mereka di catat dan diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 26 Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HURUF ARAB KE HURUF LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kerangka Teori.....	19
2.1.1 Inklusi Keuangan.....	19
2.1.2 Indikator Inklusi Keuangan .....	27
2.1.3 Perbankan Syariah .....	31
2.1.4 Pembiayaan syariah pada sektor Usaha Mikro, Kecil	

Dan Menegah.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.2 Kerangka Pemikiran .....	53
2.3 Hipotesis .....	53

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.2 Populasi dan Sampel.....	56
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	56
3.4 Variabel Penelitian.....	57
3.4.1 Variabel Independen.....	60
3.4.2 Variabel Dependen.....	61
3.5 Teknik Analisis Data.....	63
3.5.1 Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Syariah.....	63
3.5.2 Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Syariah pada UMKM.....	69

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Indeks Inklusi Keuangan Syariah.....	71
4.1.1 Dimensi Inklusi Keuangan Syariah.....	71
4.1.2 Indeks Dimensi Inklusi Keuangan Syariah .....	76
4.1.3 Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada 33 Provinsi di Indonesia.....	86
4.2 Pembiayaan Syariah Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil	

Dan Menengah.....	93
4.3 Analisis Data.....	99
4.3.1 Uji Nomalitas.....	99
4.3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana.....	103
4.4 Pembahasan.....	106

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Tabel 4.2 Data Perhitungan Indeks Dimensi Inklusi Keuangan  
Syariah

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Indeks Dimensi Inklusi Keuangan  
Syariah

Tabel 4.4 Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada 33 Provinsi di  
Indonesia

Tabel 4.5 Proporsi Pembiayaan Syariah Sektor UMKM dan non  
UMKM Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah  
(Milyar)

Tabel 4.6 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah sektor UMKM 2015-  
2018 (Milyar rupiah)



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram dan P-Plot

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

Gambar 4.3 Hasil Uji Hipotesis

Gambar 4.4 Koefisien Determinasi

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal di beberapa negara ASEAN

Grafik 1.2 Proporsi UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017

Grafik 4.1 Jumlah Kantor Layanan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Tahun 2015-2018

Grafik 4.2 Jumlah DPK Perbankan Syariah Tahun 2015-2018

Grafik 4.3 Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2015-2018

Grafik 4.4 Peringkat Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada 33 provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018

Grafik 4.5 Perkembangan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Periode 2015-2018

Grafik 4.6 Pembiayaan Syariah pada Sektor UMKM 2015-2018

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akses terhadap jasa keuangan formal merupakan faktor penting yang mendukung usaha pengentasan kemiskinan.<sup>1</sup> Sektor keuangan formal terutama perbankan memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan jasa keuangan karena perbankan merupakan sektor keuangan yang menguasai industri keuangan di Indonesia. Statistik OJK mencatat perbankan memiliki aset terbesar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mencapai Rp 8.068 triliun posisi desember 2018 atau sekitar 78% persen dari total aset industri keuangan pada tahun 2018.<sup>2</sup> Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2016, perbankan merupakan penyedia layanan keuangan utama di Indonesia karena memiliki indeks inklusi keuangan

---

<sup>1</sup>Laura Grace Gabriella dan Miranda Swaray Goeltom, *Pengaruh pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, FE Universitas Indonesia, 2013

<sup>2</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia : Desember 2018*,  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2018.aspx> diakses 22 Januari 2019

sektoral paling tinggi setelah BPJS Kesehatan yakni sebesar 63,63%.<sup>3</sup> Beberapa literatur juga membuktikan bahwa pembangunan di sektor perbankan dapat mengurangi hambatan terhadap akses masyarakat miskin yang belum secara maksimal menggunakan atau memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal di Indonesia.<sup>4</sup>

Peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal di Indonesia menjadi agenda penting karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal. Berdasarkan hasil survei World Bank tahun 2010, hanya setengah penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Lebih tepatnya, secara nasional akses terhadap jasa keuangan formal (bank) hanya menjangkau sekitar 49% dari total jumlah penduduk. Akses kepada jasa tabungan, sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal, sedangkan 18% penabung menyimpan di sektor informal sementara 32% lainnya tidak memiliki tabungan

---

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan* 2016, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat/17.01.23%20Tayangan%20%20Presscon%20%20nett.compressed.pdf> diakses 22 Januari 2019

<sup>4</sup>I Made Sanjaya, *"Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia"*, Tesis. Institut Pertanian Bogor, 2014

sama sekali baik sektor formal maupun informal. Dalam hal akses kepada pinjaman, hanya 17% dari total penduduk Indonesia yang meminjam dari bank, sekitar sepertiga lainnya meminjam dari sektor informal dan sekitar 40% penduduk Indonesia tidak memiliki akses kredit.<sup>5</sup>

Pada tahun 2011, World Bank kembali melakukan survei yang hasilnya menunjukkan bahwa hanya 20% penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 36% dan yang paling mutakhir pada tahun 2017 penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan sebesar 48%. Meskipun mengalami peningkatan namun posisi Indonesia jauh dibawah Thailand, Malaysia dan Singapura.<sup>6</sup>

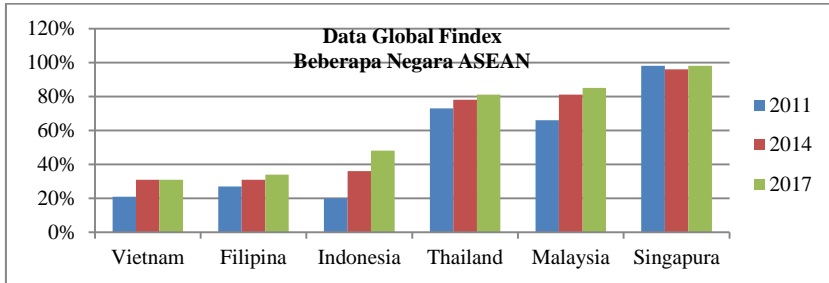
### Grafik 1.1

Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal di beberapa negara ASEAN

---

<sup>5</sup>Bank Dunia, *Meningkatkan Akses Terhadap Jasa Keuangan di Indonesia: Ringkasan Eksekutif*, h. 2-3  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/372831468039054109/pdf/520320WP0v10BA10Box345548B01PUBLIC1.pdf> diakses 22 Januari 2019

<sup>6</sup>World Bank, *The Global Findex Database 2017*, <https://globalfindex.worldbank.org/> diakses 22 Januari 2019



Sumber: Database Global Findex, World Bank

Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal.<sup>7</sup> Rendahnya akses menyebabkan kemampuan masyarakat untuk terhubung pada berbagai layanan jasa keuangan dan kegiatan produktif menjadi terbatas. Keterbatasan akses terhadap layanan jasa keuangan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melambat.<sup>8</sup> Dengan demikian, Penyediaan akses terhadap jasa keuangan bagi penduduk Indonesia yang lebih luas

---

<sup>7</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 2014, h. 4  
<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Pages/Booklet-Keuangan-Inklusif.aspx> diakses 22 januari 2019

<sup>8</sup>Allen F, et al., *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts*, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team. World Bank : Working paper No 6290. 2012

akan membantu pemberantasan kemiskinan, penurunan ketimpangan tingkat pendapatan dan percepatan pembangunan ekonomi.

Program inklusi keuangan perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang bisa diakses lebih mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, maka dibentuk strategi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi dengan meminimalisir hambatan-hambatan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan. pada tahun 2014, Bank Indonesia bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2NK) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan membentuk Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai pedoman kebijakan inklusi keuangan di Indonesia. SNKI memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui penciptaan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Bank Indonesia, *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx>diakses 28 Januari 2019

Strategi peningkatan inklusi keuangan antara lain melalui program Gerakan Indonesia Menabung (GIM), Tabungan-Ku, Layanan Keuangan Digital, Financial Identity Number (FIN), Sistem Informasi bagi Petani & Nelayan (SIPN), Laku pandai atau *Branchless Banking*, Kredit Usaha Rakyat (KUR), E-Money, Telkomsel Cash, dan peningkatan layanan *microfinance*. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) terdapat enam pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, perlindungan konsumen. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.<sup>10</sup>

Sebagai strategi nasional, inklusi keuangan didorong oleh lembaga keuangan perbankan konvensional maupun syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus berdasarkan nilai-nilai Islam memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan inklusi keuangan di Indonesia

---

<sup>10</sup>Bank Indonesia, *Program Keuangan Inklusif*, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx> diakses 13 Februari 2019



ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing.<sup>11</sup> Selain itu, inklusi keuangan selaras dengan konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam Islam yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan. Target utama yang ingin diraih dalam pendistribusian secara adil adalah mengurangi kesenjangan diantara masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan inklusi keuangan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Inklusi keuangan dan pemerataan distribusi kekayaan bermaksud agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan

---

<sup>11</sup>Novia Nengsih, *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, Jurnal Etikonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 14 No. 2, 2015, h. 221 – 240

<sup>12</sup> Rahmat Taufik, *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 11

*bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr [59]: 7)*

Terpusatnya harta kekayaan yang terbatas peredarannya hanya pada orang-orang kaya saja dilarang dalam Islam. Seharusnya harta kekayaan tersebar merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah dalam seminar nasional keuangan inklusif tahun 2014 yang memandang *islamic financial inclusion* sebagai kondisi penyelarasan inklusi keuangan dengan prinsip syariah. Keuangan syariah dan kebijakan inklusi keuangan memiliki kesamaan konsep yaitu inklusi keuangan bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat *unbanked*, serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip kerjasama dan bagi hasil. Oleh karena itu, Keuangan syariah dan kebijakan inklusi keuangan memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Yudi Suharsono, *Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Bisa Bersinergi*, <http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi/> diakses 23 januari 2019

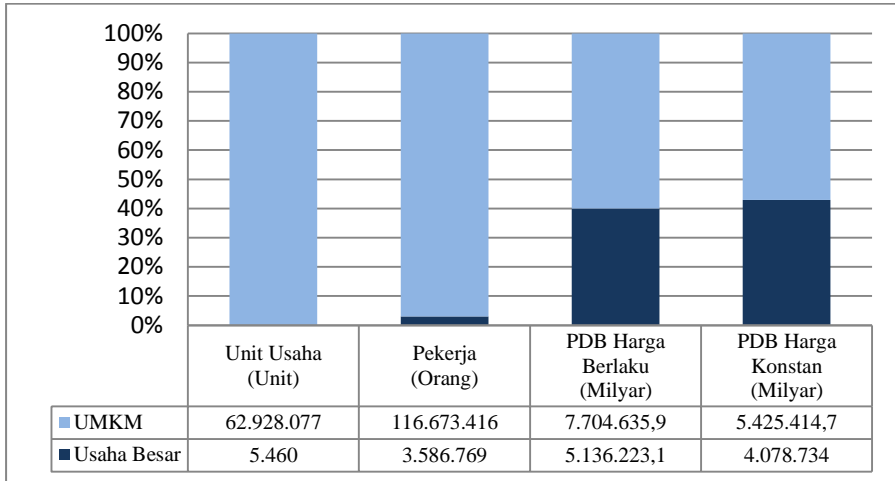
Inklusi keuangan juga erat kaitannya dengan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam inklusi keuangan karena merupakan ekonomi mayoritas rakyat. Berdasarkan data pada tahun 2017, sektor UMKM memiliki proporsi kurang lebih 99 persen lebih dari total keseluruhan pelaku usaha Indonesia atau sebanyak sekitar 62,92 juta unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerjalebih dari 116 juta orang. UMKM mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional lebih besar daripada usaha besar yaitu PDB menurut harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 60%.<sup>14</sup>

### Grafik 1.2

#### Proporsi UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017

---

<sup>14</sup>Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778\\_UMKM%202016-2017%20rev.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf) diakses 13 Februari 2019



Sumber: *depkop.go.id*, diolah 2019

Berdasarkan data tersebut, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian negara. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya dan mengurangi angka pengangguran yang pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan.<sup>15</sup>

Meskipun UMKM menempati fondasi perekonomian yang cukup sentral sebagai mayoritas usaha, UMKM memiliki akses yang terbatas terhadap modal

<sup>15</sup>Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006, h. 1-16

terutama pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan bank. Akses UMKM terhadap permodalan masih belum maksimal. UMKM sulit untuk mengakses permodalan dari institusi keuangan formal karena latar usahanya yang bisa dikategorikan *unbankable* atau juga disebut kelompok usaha defisit.<sup>16</sup> Pembiayaan atau kredit yang disalurkan pada UMKM pada akhir tahun 2018 hanya mencapai 19,85% persen atau sekitar seperlima dari pangsa kredit nasional.<sup>17</sup> Maka dari itu, sistem keuangan yang inklusif bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro yang terhambat akses untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan agar dapat mengembangkan usahanya.

Inklusi keuangan memiliki indikator multidimensi, Sarma mengemukakan ada tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari inklusi keuangan yaitu aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*) dan kemanfaatan atau penggunaan (*usage*) dari layanan perbankan.<sup>18</sup> Bank Indonesia juga mengemukakan faktor-faktor yang dominan didalam

---

<sup>16</sup>Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal Human Falah, Vol. 4. No. 2 Juli – Desember 2017, h. 196

<sup>17</sup>Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Pages/Data-Kredit-UMKM-Desember-2018.aspx> diakses 23 januari 2019

<sup>18</sup>Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No. 07, 2012

inklusi keuangan yaitu dimensi akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan.<sup>19</sup>

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan inklusi keuangan sudah dilakukan oleh suatu negara adalah melalui pengukuran indeks inklusi keuangan.<sup>20</sup> Selain itu, pengukuran tingkat inklusi keuangan berdasarkan indeks inklusi keuangan juga dapat digunakan untuk mengetahui distribusi layanan sektor perbankan.<sup>21</sup> Mengingat peranan inklusifitas sektor keuangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengukuran inklusifitas keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan ekonomi dan inklusi keuangan yang berbasis pada bukti dan temuan empiris.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini mencoba menganalisis dan mengukur inklusifitas sektor keuangan syariah di

---

<sup>19</sup>Bank Indonesia, *Indeks Keuangan Inklusif*, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/index/contents/default.aspx> diakses 23 januari 2019

<sup>20</sup>Chaerani Nisa, *et al.*, *Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. 2 (2), 2018, h. 141-152.

<sup>21</sup>Bintan Badriatul Ummah, *et al.*, *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 4 No. 1, h. 3

Indonesia dengan menggunakan data perbankan syariah serta mengukur dampak inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menghubungkan antara inklusi keuangan dengan pembiayaan syariah pada UMKM dilandasi dari hasil penelitian Fahmy *et al.* yang menyatakan bahwa inklusi keuangan yang diukur dari dimensi akses dan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta secara bersama-sama variabel kontrol LDR dengan variabel akses dan variabel penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia.<sup>22</sup>

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia serta mengetahui pengaruh inklusi keuangan syariah berdasarkan indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga judul penelitian ini adalah:

---

<sup>22</sup>Obaid M Fahmy, *et al.*, *Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 118 - 135

*“Indeks inklusi keuangan syariah serta pengaruhnya terhadap pembiayaan syariah pada usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia”.*

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangansyariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai indeks inklusi keuangan syariah dan mengukur tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.



### 1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian antara lain :

#### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, evaluasi dan perbaikan serta pertimbangan mengenai inklusivitas keuangan syariah sehingga dapat memaksimalkan program-program yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan syariah untuk memperluas akses jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai keefektifan regulasi untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia sehingga program-program yang telah dijalankan dapat mencapai tujuan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan penerapan ilmu ekonomi, sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang

berkaitan dengan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi agar dapat melakukan pengembangan penelitian yang lebih baik mengenai inklusi keuangan.

Bagi penulis penelitian ini sebagai wadah untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari pada masa perkuliahan, mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu cara penulis untuk menguraikan permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa sekarang menggunakan pendekatan ilmiah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan secara singkat sebagai berikut:

Bab I memuat tentang pendahuluan yang dijadikan dasar dalam memulai penelitian. Didalamnya dipaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian tentang inklusi

keuangan. selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi-informasi variabel penelitian dan tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya pengembangan hipotesis dirumuskan dari landasan teori dan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Bab III berisi penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian pada bab pendahuluan. Semua prosedur, proses dan hasil penelitian merupakan inti dari bab ini. Bab ini memberikan penjelasan mengenai Jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai indeks inklusi keuangan dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab V memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas

sebelumnya dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu fokus pembangunan pada sektor keuangan di berbagai negara. Berbagai Institusi internasional seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara Indonesia memfokuskan kegiatannya pada inklusi keuangan. Meskipun begitu, masih belum ada definisi baku yang menjelaskan apa sebenarnya inklusi keuangan itu sendiri. Berbagai institusi mencoba untuk mendefinisikannya. Global Partnership For Financial Inclusion (GPFI-CGAP) Forum pada tahun 2012 mendefinisikan inklusi keuangan :<sup>1</sup>

*“State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments,*

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, *Keuangan Inklusif di Indonesia*,  
<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx> diakses 3 Februari 2019

*and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”*

Sarma mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan kemanfaatan dari sistem keuangan formal untuk semua pelaku ekonomi.<sup>2</sup> Definisi serupa diungkapkan oleh Okaro dalam penelitian Anwar dan Amri, Inklusi keuangan adalah sebuah proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi berpendapatan rendah.<sup>3</sup> Sedangkan Demirguc-

---

<sup>2</sup>Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial Sector Inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No. 07, 2012 h. 3

<sup>3</sup>Khoirul Anwar dan Amri, *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* Vol.2 No.3 Agustus 2017, h. 455

Kunt dan Klapper mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya.<sup>4</sup>

Menurut Bank Indonesia inklusi keuangan adalah seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga.<sup>5</sup> Dalam strategi nasional keuangan inklusif, inklusi keuangan didefinisikan sebagai:<sup>6</sup>

*“Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif,*

---

<sup>4</sup>Demirguc-Kunt A, dan Klapper L, *Measuring Financial Inclusion The Global Financial Index*, World Bank: Working Paper No 6025, 2012

<sup>5</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet*, h. 4  
<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents/Buku%20Saku%20Keuangan%20Inklusif.pdf> diakses 22 januari 2019

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 6

*pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil”.*

Dari berbagai definisi tentang inklusi keuangan diatas, disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah penyediaan kemudahan akses dan peniadaan hambatan dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan kepada lembaga keuangan formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang memiliki akses yang terbatas dari layanan keuangan formal.

Kegiatan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai inklusi keuangan dimana Indonesia berpartisipasi aktif didalamnya. Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan inklusi keuangan. Dalam Strategi Nasional



Keuangan Inklusif, strategi inklusi keuangan dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.<sup>7</sup>

Inklusi keuangan merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan karena setiap individu memiliki hak untuk dapat mengakses jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Bank Indonesia, *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx> diakses 3 Februari 2019

<sup>8</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet....*, h. 8-10

Memberikan akses kepada masyarakat merupakan upaya mewujudkan *Maqashid Syari'ah* yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Menurut Al Fasi, maqashid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariatNya.<sup>9</sup> Menurut sanusi dan sohari yang mengutip pendapat wahbah al-Zuhaili, maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (maqashid) dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum.<sup>10</sup> Hukum-hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan, mendatangkan kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal termasuk dalam upaya dalam mewujudkan

---

<sup>9</sup>Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017, h. 44

<sup>10</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul fiqh*, Depok:Raja Grafindo Persada, 2015, h. 245

maqashid syariah. Program-program inklusi keuangan mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kesulitan dalam mengakses layanan keuangan dengan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain upaya mewujudkan maqashid syariah, inklusi keuangan juga merupakan indikator penting yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan. Dalam inklusi keuangan, pemerintah berkontribusi dalam melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan.<sup>11</sup>

Upaya-upaya dalam program inklusi keuangan merupakan bentuk implementasi dari firman Allah SWT yakni Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan*

---

<sup>11</sup>Eko Fajar Cahyono, *Faktor Dominan pada Indeks Inklusi Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 1, 2017, h. 55 - 79

*tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*(QS. al-Maidah [05]: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Program inklusi keuangan yang mengupayakan kemudahan akses layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya *unbankable people* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong.

Pemerintah serta sektor perbankan sebagai penyedia layanan keuangan utama di Indonesia, khususnya bank syariah berperan penting dalam peningkatan inklusi keuangan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam yang mengedepankan pemerataan distribusi kekayaan yang bersandar kepada nilai-nilai keadilan supaya tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi. Nilai-nilai pemerataan keadilan harus diterapkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan firman Allah:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*(QS. Shad [38]: 26)

Pemertaan pendapatan melalui penyediaan akses yang mudah untuk seluruh lapisan masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan merupakan tugas pemerintah dalam berbuat adil untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat.

### 2.1.2 Indikator Inklusi keuangan

Berbagai indikator digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara melaksanakan konsep inklusi keuangan. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari inklusi keuangan sebuah negara adalah ketersediaan/akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan

penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.<sup>12</sup>

Bank Indonesia menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu cara alternatif untuk pengukuran inklusi keuangan yaitu menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet....*, h. 14

<sup>13</sup>Bank Indonesia, *Indeks Keuangan Inklusif*,

Sarma mengemukakan indeks inklusi keuangan atau *Index of Financial Inclusion* (IFI) untuk mengukur keinklusan sistem keuangan di suatu negara. Perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma berdasarkan tiga dimensi, yaitu *aksesibilitas*, *availabilitas*, dan *usage* pada lembaga keuangan formal perbankan.<sup>14</sup>

a. *Aksesibilitas* (Penetrasi Perbankan)

Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Oleh karena itu sistem keuangan harus menjangkau secara luas di antara penggunanya. Ukuran populasi yang mengakses bank, misalkan proporsi populasi yang memiliki rekening di bank adalah sebuah ukuran dari penetrasi perbankan. Dimensi ini menggunakan jumlah rekening bank per 1000 penduduk usia dewasa sebagai indikatornya. Penetrasi perbankan merupakan indikator utama dalam inklusi keuangan.

b. *Availabilitas* (ketersediaan jasa keuangan)

---

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/indikator/indeks/contents/default.aspx> diakses 23 Januari 2019

<sup>14</sup>Mandira Sarma, *Index.....*, h. 3-4

Pada sistem keuangan inklusif, layanan perbankan harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. ketersediaan jasa perbankan menggambarkan jangkauan perbankan kepada masyarakat. Indikator yang menggambarkan dimensi ini dapat berupa outlet dari perbankan misalkan jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di suatu wilayah. Jumlah pegawai bank untuk setiap pelanggan juga dapat digunakan sebagai indikator lainnya terhadap ketersediaan layanan perbankan. Lebih jauh, dengan semakin majunya perkembangan dunia digital di sektor perbankan, data terhadap ketersediaan layanan perbankan berbasis elektronik atau internet sebaiknya juga dimasukkan pada dimensi ini. Akan tetapi karena tidak adanya data yang konsisten terhadap indikator jumlah pegawai dan layanan perbankan berbasis elektronik maka Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah jumlah kantor cabang bank per dan jumlah ATM (*Automatic Teller Machine*) per 100.000 orang dewasa.

c. *Usage* (Penggunaan jasa perbankan)



Dimensi ini didorong oleh gagasan adanya masyarakat *underbanked* dan *marginally banked*. Mereka adalah kelompok masyarakat yang walaupun telah memiliki akses terhadap jasa keuangan berupa kepemilikan rekening, masih terdapat sekelompok orang belum dapat memanfaatkan keberadaan jasa keuangan secara maksimal. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa alasan diantaranya, jauhnya outlet bank atau memiliki pengalaman buruk dengan penyedia jasa. Oleh karena itu, memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif, namun juga harus dapat digunakan. Kegunaan tersebut diantaranya dapat dalam bentuk kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer. Karena keterbatasan data, indikator yang dipertimbangkan adalah dua layanan dasar sistem perbankan yaitu kredit atau pembiayaan dan deposit atau simpanan sehingga indikator untuk ini adalah jumlah deposit dan pembiayaan terhadap PDB.

### 2.1.3 Perbankan Syariah

Sesuai undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>15</sup> Selain prinsip syariah, bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang

---

<sup>15</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> diakses 24 Januari 2019

mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu ada yang dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional berfungsi sebagai kantor induk dari kantor/unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Mhd. Asaad, *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*, MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011, h. 116-117

<sup>17</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 7-10

Bank Syariah merupakan sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Larangan dalam memungut maupun meminjam dengan bunga (riba) serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dilarang dalam Islam menjadi dasar pengembangan sistem ini.<sup>18</sup> Bank syariah juga dikembangkan atas desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam.<sup>19</sup>

Landasan hukum Islam dari pelaksanaan perbankan syariah tertuang dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَادْنُهَا ۖ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran*

---

<sup>18</sup>*Ibid.*h. 117

<sup>19</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 13

*(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusan nya (terserah) kepada Allah.” (QS. al-Baqarah [2]:275)*

Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) dalam kegiatannya bank syariah menghimpun dan menyalurkan danadari pihak-pihak yang memiliki kelebihan danakepada pihak lain yang mengalami kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan agar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga terjadi hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dengan menggunakan sistem bagi hasil.<sup>20</sup> Bank menyalurkan dana dari *shohibul mal* kepada *mudharib* pada umumnya menggunakan akad jual beli dan kerja sama usaha. Sedangkan

---

<sup>20</sup>Abdus Salam Dz., *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*, Al-Amwal, Volume 10, No. 1, 2018, h. 65-66

imbalan yang diterima bisa dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.<sup>21</sup> Selain itu, bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai *mudharib* menawarkan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>22</sup>

Undang-undang perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>23</sup>

#### 2.1.4 Pembiayaan syariah pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat dan untuk masyarakat serta memberikan layanan jasa dalam lalu lintas

---

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana, 2011 h. 32

<sup>22</sup>Abdus Salam Dz., *Inklusi....*, h. 66

<sup>23</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*,  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> diakses 08 Maret 2019

pembayaran. Dana yang telah dihimpun oleh bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan piutang qardh berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>24</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang digunakan.<sup>25</sup> Adapun pembiayaan yang dapat

---

<sup>24</sup>Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan*..... h. 106

disalurkan dengan basis bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu akad kerjasama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak, pembiayaan berbasis jual beli *murabahah* yang keuntungannya disepakati oleh penjual dan pembelihingga pembiayaan yang bersifat sosial/kebajikan *qardh* yaitu pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, pembiayaan diberikan pada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Dalam mengimplementasikan inklusi keuangan, bank syariah memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengangkat perekonomian negara. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal juga turut mengimplementasikan inklusi keuangan yang bertujuan untuk pemeratakan akses keuangan di Indonesia dan telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam

---

<sup>26</sup>Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal *HUMAN FALAH*: Volume 4. No. 2 Juli – Desember 2017, h. 201



memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan.<sup>27</sup> Bank Umum Syariah (BUS) juga turut mengimplementasikan keuangan inklusif bagi para pelaku UMKM meskipun Preferensi Bank Umum Syariah atas akses UMKM lebih rendah dibanding bank syariah dengan ukuran yang lebih kecil (BPRS).<sup>28</sup>

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 17/12/PBI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memuat beberapa poin yang pada intinya adalah kewajiban bank-bank untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar minimal 20%.<sup>29</sup>

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 193-2017

<sup>28</sup>Ernawati, *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Al Falah: *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No.1: 2016

<sup>29</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Pasal 2

kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan Undang-undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Kriteria-kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu modalnya maksimal 50 juta, sedangkan omsetnya mencapai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal maksimal 500 juta dengan omset maksimal 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 milyar atau hasil penjualan tahunan sebesar 50 milyar.<sup>30</sup>

UMKM telah mampu mengambil peran dalam mengembangkan perekonomian menjadi lebih baik melalui penggunaan modal kerja yang tidak banyak tetapi menyerap banyak tenaga kerja. Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS terutama dalam hal akses permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.<sup>31</sup> Perbankan syariah pun sangat diharapkan mampu untuk terlibat lebih mendalam untuk ikut dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai produk-produknya sesuai akad dan masuk secara langsung ke sektor riil.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1-6

<sup>31</sup> Lina marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*, Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018

Program inklusi keuangan memiliki tujuan utama yaitu mendorong pertumbuhan inklusif melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi keuangan, serta peningkatan stabilitas sistem keuangan.<sup>32</sup> Di Indonesia, penelitian mengenai inklusi keuangan sudah banyak dilakukan. Penelitian dilakukan dari berbagai sudut pandang.

Dienillah & Anggraeni menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di Asia dalam periode 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat korelasi negatif pada tingkat signifikan 5% antara keuangan inklusif dan stabilitas keuangan. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan salah satunya adalah inklusi keuangan. peningkatan dalam inklusi keuangan, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan stabilitas keuangan.<sup>33</sup>

Anwar dan Amri meneliti pengaruh keuangan inklusif terhadap PDB Indonesia dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah OLS

---

<sup>32</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet.....*, h. 7

<sup>33</sup>Azka Azifah Dienillah Dan Lukytawati Anggraeni, *Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18 Nomor 4, April 2016, h. 410-427

(*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan seperti jumlah kantor bank, jumlah ATM, dan jumlah rekening kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.<sup>34</sup>

Fadi Hassan Shihadeh *et al.*, melakukan studi untuk menyelidiki hubungan antara *financial inclusion* (FI) dan kinerja bank dalam ekonomi Jordan menggunakan data tahunan dari 13 bank komersial dari 2009 hingga 2014. Kinerja diukur dengan pendapatan kotor dan pengembalian aset (ROA) dari bank-bank ini. Penelitian menggunakan enam ukuran FI yang berbeda meliputi kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM), simpanan untuk UKM, jumlah ATM, jumlah layanan ATM, jumlah kartu kredit, dan layanan baru. Hasil penelitian terdapat dampak signifikan FI terhadap kinerja bank komersial ketika diukur dengan pendapatan kotor, dan ROA yang berarti bahwa *financial inclusion* berkontribusi dalam meningkatkan kinerja bank.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan indeks inklusi keuangan, beberapa penelitian mencoba untuk mengukur sejauh mana inklusivitas keuangan yang terdapat pada beberapa negara. Sarma mengembangkan metode perhitungan

---

<sup>34</sup>Khoirul Anwar dan Amri, *Pengaruh.....*, h. 454-462

<sup>35</sup>Fadi Hassan Shihadeh, *et al.*, *Does Financial Inclusion Improve the Banks' Performance? Evidence from Jordan*, in John W. Kensinger (ed.) *Global Tensions in Financial Markets (Research in Finance, Volume 34)* Emerald Publishing Limited, pp.117 – 138

*Index Financial Inclusion* (IFI) yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan antar negara atau provinsi dalam sebuah negara pada periode waktu tertentu. IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.<sup>36</sup> Ummah, *et al.* melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder dari 33 provinsi 2007-2011, untuk mengukur tingkat akses dan penggunaan jasa keuangan di seluruh provinsi di Indonesia dengan Indeks Inklusi Keuangan dengan menggunakan perhitungan *Index of Financial Inclusion* yang dikembangkan oleh Sarma. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan dengan regresi panel tobit, dan menggambarkan hubungan antara inklusi keuangan dan distribusi pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong rendah. Ukuran ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara positif memengaruhi tingkat inklusi keuangan.<sup>37</sup>

Sanjaya dan Nursechafia mengkaji hubungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan model regresi serta metode data panel untuk mengestimasi hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan terdapat korelasi positif antara inklusi

---

<sup>36</sup>Mandira Sarma, *Index.....*, h. 1-32

<sup>37</sup>Bintan Badriatul Ummah *et al.*, *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 4 No 1 hlm. 1-27

keuangan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia dan menemukan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan.<sup>38</sup>

Umar menghitung dan menganalisis Indeks Inklusi Keuangan Syariah atau *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) yang mencakup tiga dimensi yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan perbankan syariah pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2010-2015 serta meneliti hubungan inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Secara umum, inklusi keuangan syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas dan penggunaan. Sementara dimensi availabilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Selain itu, dari hasil analisis kuantitatif, penelitian ini juga menemukan bahwa *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) positif

---

<sup>38</sup>I Made Sanjaya dan Nursechafia, *Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016

berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).<sup>39</sup>

Chaerani Nisa, *et al.* (2018) mengukur indeks keuangan inklusif sepuluh bank terbesar yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode pengukuran yang diperkenalkan oleh Sarma (2012). Hasil penelitian menunjukkan kesepuluh bank berada pada kategori medium dengan nilai berkisar antara 0,333 hingga 0,487. Hasil lainnya juga menunjukkan, pada beberapa kasus bank dengan aset besar memiliki indeks keuangan inklusif yang lebih baik.<sup>40</sup>

Penelitian tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap pembiayaan pada UMKM dilakukan oleh Fahmy *et al.* dengan menggunakan metode purposive sampling, total 33 provinsi dipilih sebagai sampel dengan periode pengamatan dari 2010 hingga 2013. Hasilnya menyatakan bahwa keuangan inklusif yang diukur dari dimensi akses dan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Fahmy *et al.* menggunakan rasio LDR dan Non Performing Loans

---

<sup>39</sup>Azwar Iskandar Umar, *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017

<sup>40</sup>Chaerani Nisa *et al.*, *Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. 2(2), 2018, h. 141-152.



(NPL) sebagai variabel kontrol. Secara bersama-sama (simultan) variabel kontrol LDR dengan dimensi akses dan dimensi penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia sementara NPL memiliki efek negatif tetapi signifikan.<sup>41</sup>

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah membahas secara khusus topik pengaruh inklusi keuangan pada pembiayaan yang disalurkan pada UMKM di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya mempertimbangkan topik secara umum. Penelitian-penelitian inklusifitas sektor keuangan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma (2012), Sanjaya dan Nursechafia (2016) dan Ummah *et al.* (2011) masih melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan konvensional (non-syariah). Penelitian Umar (2017) mengukur indeks inklusi keuangan syariah periode 2010-2015 dan menganalisis hubungan antara inklusifitas keuangan syariah dengan kesejahteraan sedangkan penelitian ini mengukur indeks inklusi keuangan syariah periode 2013-2018 dan menganalisis hubungan antara inklusifitas keuangan syariah dengan pembiayaan pada

---

<sup>41</sup>Obaid M Fahmy, *et al.*, *Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 118 - 135

UMKM. Sekaligus membedakan penelitian ini dengan penelitian Chaerani Nisa *et al.* (2018) yang mengukur indeks keuangan inklusif pada sepuluh bank terbesar di Indonesia yang semuanya adalah bank konvensional.

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode atau Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sarma, Mandira. (2012). <i>Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness.</i>	Mengusulkan sebuah Index Financial Inclusion (IFI).	Metode Kuantitatif	Mengusulkan <i>Index of financial inclusion (IFI)</i> , yaitu penetrasi perbankan ( <i>Banking penetration</i> ), ketersediaan jasa perbankan ( <i>Banking service</i> ) dan penggunaan jasa perbankan ( <i>Banking Usage</i> )
2.	Dienillah, Azka Azifah dan Anggraeni, Lukytawati. (2016). <i>“Dampak Inklusi</i>	penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas	Metode yang digunakan adalah korelasi Pearson dan Fixed Effect	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi negatif pada Tingkat signifikan 5% antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan.

	<i>Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia”</i>	keuangan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di tujuh negara Asia	Model.	Faktor - faktor yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan adalah inklusi keuangan, stabilitas keuangan pada periode sebelumnya, aliran modal non-FDI ke PDB, rasio aset lancar terhadap deposito dan pendanaan jangka pendek, dan PDB per kapita.
3.	Anwar, Khoirul dan Amri. (2017). <i>Pengaruh inklusi keuangan terhadap PDB Indonesia.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap PDB Indonesia.	Metode analisis data yang digunakan adalah OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> ).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan seperti jumlah kantor bank, jumlah ATM, dan jumlah rekening kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.
4.	Ummah, et al. (2013). , <i>“Analisis Keterkaitan Keuangan Inklusif dengan</i>	bertujuan untuk mengukur tingkat akses dan penggunaan jasa keuangan	Metode Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong rendah. Ukuran ekonomi dan ketimpangan

	<i>Pembangunan di Asia.</i>	di seluruh provinsi di Indonesia dengan Indeks Inklusi Keuangan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan serta menggambarkan hubungan antara inklusi keuangan dan distribusi pendapatan di Indonesia.		pendapatan secara positif memengaruhi tingkat inklusi keuangan. pelebaran ketimpangan pendapatan menyebabkan inklusi keuangan yang lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, jumlah telepon seluler dan pengguna internet memengaruhi secara positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketidaksetaraan pendapatan dan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah, ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya.
5.	Sanjaya dan Nursechafia. (2016). <i>"Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar</i>	mengukur dan menganalisis tingkat inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia.	menganalisis data penelitian menggunakan <i>software</i> statistik STATA dan	Hasilnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan

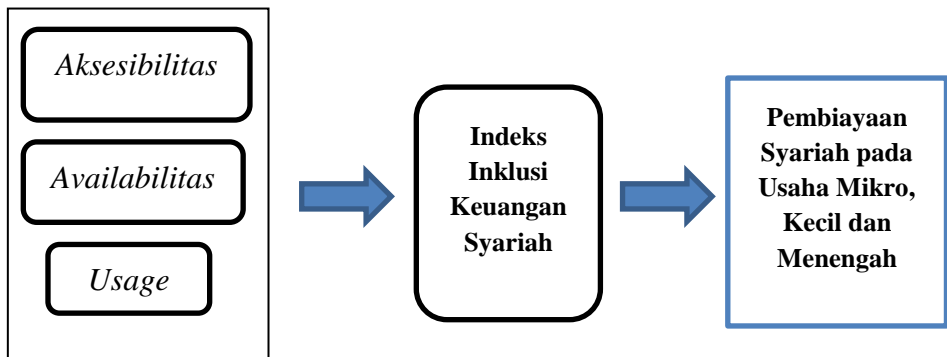
	<i>Provinsi di Indonesia”.</i>		EXCEL.	penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Kesimpulannya, kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan fungsi kesempatan sosial ( <i>social opportunity function</i> ) untuk mengukur pertumbuhan inklusif, dan menemukan korelasi positif dengan inklusi keuangan.
6.	Umar, Azwar Iskandar. (2017).” <i>Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia</i> ”	menghitung dan menganalisis Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI) yang mencakup tiga ukuran; aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan	metode pengukuran Indeks Inklusi keuangan atau <i>Index of Financial Inclusion</i> (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma	Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia umumnya rendah dan Bangka Belitung adalah provinsi yang paling inklusif secara finansial dari Indonesia. Selanjutnya, hasilnya menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan Syariah

		layanan perbankan syariah.	(2012)	positif berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia.
7.	Chaerani Nisa et al. (201). <i>“Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia</i>	Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan keuangan inklusif pada sepuluh bank dengan aset terbesar di Indonesia.	Metode kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan kesepuluh bank berada pada kategori medium. Hasil lainnya juga menunjukkan, pada beberapa kasus bank dengan aset besar memiliki indeks keuangan inklusif yang lebih baik
8.	Fahmy et al. 2016. <i>Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia</i>	Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor UMKM di Indonesia	Metode purposive sampling	Keuangan inklusif yang diukur dari dimensi akses dan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kredit yang disalurkan pada UMKM di Indonesia serta secara simultan variabel kontrol LDR dengan dimensi akses dan penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit

				UMKM di Indonesia.
9.	Fadi Hassan Shihadeh <i>et. al.</i> 2018. <i>Does Financial Inclusion Improve the Banks' Performance? Evidence from Jordan</i>	Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui hubungan antara <i>financial inclusion</i> (FI) dan kinerja bank dalam ekonomi Jordan		Hasil penelitian menemukan dampak signifikan <i>Financial Inclusion</i> terhadap kinerja bank ketika diukur dengan pendapatan kotor, dan ROA. Tetapi menampilkan hasil yang berbeda ketika mempertimbangkan efek variabel FI secara terpisah.

*Sumber: Data hasil penelitian, 2019*

## 2.2 Kerangka Pemikiran



## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fahmy et al. (2016), menunjukkan adanya pengaruh keuangan inklusif terhadap pembiayaan

pada UMKM di Indonesia. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap pembiayaan syariah pada sektor UMKM



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, data sekunder dikumpulkan, dilakukan analisa untuk kemudian berdasarkan data tersebut peneliti membuat interpretasi atas hasil yang diperoleh.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder per provinsi yaitu data perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta data jumlah penduduk dewasa dan PDRB. Data berbasis tahunan yaitu tahun 2015-2018 pada 33 provinsi di Indonesia yang bersumber dari statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang dibutuhkan antara lain jumlah kantor perbankan syariah, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah, jumlah pembiayaan perbankan syariah, PDRB, jumlah penduduk dewasa per provinsi (usia 15 tahun keatas) dan jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor UMKM.

---

<sup>1</sup>Chaerani Nisa et al., *Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. 2(2), 2018, 141-152

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>2</sup> Penelitian ini merupakan penelitian populasi dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. populasi penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia. Maka dari itu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>3</sup>

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui:

1. Statistik Perbankan Syariah (SPS) untuk mendapatkan data perbankan syariah yang diunduh

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 80

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 85

melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data penelitian merupakan data tahunan yaitu tahun 2015-2018 pada 33 provinsi di Indonesia. Jumlah data keseluruhan yang dikumpulkan adalah 132 data.

2. Statistik Angkatan Kerja Nasional untuk mendapatkan data jumlah penduduk dewasa per provinsi tahun 2015-2018 yang diunduh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data PDRB per provinsi.

#### 3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan metode indeks inklusi keuangan atau *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang dikembangkan oleh sarma dalam menganalisis dan mengukur inklusi keuangan syariah di Indonesia, maka variabel penelitian yang digunakan mengacu pada dimensi pengukuran indeks inklusi keuangan yaitu *aksesibilitas*, *availabilitas*, dan *usage*. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 39

<sup>5</sup>Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No. 07, 2012, h. 3-4

1. *Aksesibilitas* (Penetrasi Perbankan)

Indikator yang digunakan untuk dimensi aksesibilitas adalah jumlah DPK perbankan syariah per 1000 jumlah penduduk dewasa. Penelitian ini menggunakan rasio nilai DPK pada perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap 1000 penduduk dewasa. Indikator ini sesuai dengan pengukuran *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) oleh Umar (2016).

Jumlah DPK adalah jumlah seluruh dana pihak ketiga dari BUS, UUS dan BPRS yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Sedangkan penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara yang berusia di atas 15 tahun.<sup>6</sup>

2. *Availabilitas* (Ketersediaan Jasa Perbankan)

Indikator yang digunakan untuk dimensi ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah kantor layanan bank syariah per 100.000 penduduk dewasa sesuai dengan indikator yang diusulkan oleh sarma.

Jumlah kantor layanan bank adalah jumlah seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat

---

<sup>6</sup>Metadata Bank Indonesia, *Indikator Keuangan Inklusif*, <https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/SSKI/Contents/Default.aspx> diakses 28 Februari 2019

memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya. Jenis kantor bank yang tidak termasuk dalam kategori kantor layanan bank antara lain meliputi: kantor pusat non operasional, kantor wilayah, kantor cabang di luar negeri, kantor cabang pembantu diluar negeri, kantor perwakilan bank umum diluar negeri, dan kas keliling/kas mobil/kas terapung baik untuk bank yang beroperasi secara konvensional dan syariah.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini jumlah kantor layanan bank syariah adalah jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang meliputi Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

### 3. *Usage* (Penggunaan Jasa Perbankan)

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah jumlah pembiayaan (*financing*) perbankan syariah terhadap pendapatan daerah (PDRB) provinsi. Indikator ini sesuai dengan pengukuran *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) oleh Umar (2016).

Jumlah pembiayaan adalah jumlah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>8</sup>

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.<sup>9</sup>

#### 3.4.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, *Pengertian PDRB*, <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html> diakses 06 maret 2019

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>10</sup> Variabel independen pada penelitian ini indeks inklusi keuangan syariah yang mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Sarma (2012). Indeks inklusi keuangan ini akan digunakan untuk mengukur inklusi keuangan syariah di Indonesia. Periode penelitian adalah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

#### 3.4.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>11</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tabel 2.2

#### Definisi Operasional Variabel

No	Dimensi	Definisi	Indikator	Pengukuran
I.	Analisis Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Syariah			

<sup>10</sup>Sugiyono, *metode.....*, h. 39

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 39

1.	<b>Aksesibilitas</b>	Mengukur penetrasi bank syariah pada masyarakat (Sarma, 2012)	Rasio jumlah dana pihak ketiga bank syariah per 1.000 penduduk miskin dewasa	$\frac{\text{Jumlah DPK Perbankan Syariah}}{\text{Jumlah Penduduk L}} \times 100$
2.	<b>Availabilitas</b>	Mengukur kemampuan penggunaan jasa bank syariah oleh masyarakat (Sarma, 2012).	Rasio jumlah kantor bank syariah meliputi BUS dan UUS per 100.000 penduduk dewasa	$\frac{\text{Jumlah Kantor perbankan syariah}}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}} \times 100$
3.	<b>Usage</b>	Mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, (Sarma, 2012).	Rasio Pembiayaan ( <i>financing</i> ) bank syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah}}{\text{PDRB}} \times 100$
<b>II.</b>	<b>Analisis Pengaruh Inklusif Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan pada sektor UMKM</b>			
	<b>Variabel</b>		<b>Pengukuran</b>	
1.	Indeks Inklusi Keuangan Syariah (X)		Nilai indeks inklusi keuangan syariah menggunakan metode perhitungan Sarma (2012)	



2.	Pembiayaan Syariah pada Sektor UMKM (Y)	Total pembiayaan syariah BUS, UUS dan BPRS yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
----	---	--

Sumber: Sarma (2012), Umar (2016)

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pengukuran *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang digunakan oleh Sarma.<sup>12</sup> Pengukuran indeks inklusi keuangan syariah menggunakan bantuan program EXCEL. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah pada UMKM menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.<sup>13</sup> Analisis data kuantitatif dilakukan dengan komputerisasi yaitu dengan bantuan software aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23. Hasil output dari analisa SPSS kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

#### 3.5.1 Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Penelitian ini mengadopsi pengukuran *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang digunakan oleh Sarma. Indeks inklusi keuangan

---

<sup>12</sup>Mandira Sarma, *Index.....*, h. 10-19

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode.....*, h. 243

dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensi. Indeks dari setiap dimensi ( $d_i$ ) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:<sup>14</sup>

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}, i = 1, 2, 3, \dots \text{dst} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

$w_i$  = bobot untuk dimensi  $i$   $0 \leq w_i \leq 1$

$A_i$  = nilai terkini dari peubah  $i$

$m_i$  = nilai minimum (batas bawah) dari peubah  $i$

$M_i$  = nilai maksimum (batas atas) dari peubah  $i$

Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Misalkan, semakin tinggi indeks dimensi ketersediaan suatu bank, semakin tinggi pula jumlah bank yang dapat dijangkau masyarakat. Untuk menghitung indeks setiap dimensi memerlukan bobot ( $w$ ). Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan. Menetapkan bobot yang sesuai dengan indeks dimensi harus disesuaikan dengan data yang

---

<sup>14</sup>Mandira Sarma, *Index*.....h. 10

tersedia. Apabila data sepenuhnya mencirikan dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan dan dimensi penggunaan maka dapat diberikan bobot 1.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan bobot 1 untuk dimensi penetrasi perbankan karena merupakan dimensi utama dalam keuangan inklusif. Sedangkan untuk dimensi ketersediaan dan penggunaan peneliti memberikan bobot yang relatif lebih sedikit yaitu masing-masing berbobot 0,5. Hal ini mengingat pada masa kini ketersediaan layanan perbankan sudah menggunakan layanan perbankan melalui telepon dan internet banking sehingga mengurangi pentingnya fisik outlet bank. Jadi, menggunakan data hanya pada outlet fisik seperti cabang bank dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai ketersediaan layanan perbankan. Demikian pula, data kredit dan deposit hanya bisa sebagian menggambarkan penggunaan sistem keuangan sebagai layanan lain dari sistem perbankan, seperti karena pembayaran, transfer, dan pengiriman uang tidak termasuk. Dengan tidak adanya data tersebut,

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 10-11

karakterisasi lengkap dari dimensi-dimensi ini tidak dimungkinkan.

Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Batas bawah atau nilai minimum ( $m_i$ ) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk menentukan batas atas atau nilai maksimum ( $M_i$ ) untuk setiap dimensi diwakili oleh nilai maksimum data yang tersedia.<sup>16</sup>

Letak titik X, O, dan W merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan. Semakin besar jarak antara titik O dengan titik X, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan. Semakin kecil jarak antara titik X dengan titik W, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan. Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan jarak antara W dan O agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh karena itu, nilai indeks inklusi keuangan akan berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, sistem keuangan semakin inklusif. Jadi, untuk menghitung Indeks Inklusi

---

<sup>16</sup>*Ibid.* h. 10

Keuangan (IIK) langkah selanjutnya adalah menentukan nilai  $X_1$  (jarak antara O dan X) dan  $X_2$  (jarak antara X dan W) dengan rumus:<sup>17</sup>

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \dots \dots \dots (2)$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \dots \dots \dots (3)$$

Kemudian ambil rata-rata sederhana  $X_1$  dan  $X_2$  untuk menghitung IIK dengan rumus sebagai berikut:

$$IIK = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \dots \dots \dots (4)$$

Dalam penelitian ini, bobot masing-masing dimensi ( $w_i$ ) sebagai berikut, 1 untuk indeks *aksesibilitas* (penetrasi perbankan), 0,5 untuk indeks *availabilitas* (ketersediaan) dan 0,5 untuk indeks *usage* (penggunaan). Maka rumus akhir dari IIK adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.* h. 11

<sup>18</sup>*Ibid.* h. 19

$$\begin{aligned}
& \text{IIK} \\
&= \frac{1}{2} \left[ \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{1,5}} \right. \\
&\quad \left. + \left( 1 - \frac{\sqrt{(1 - d_1)^2 + (0,5 - d_2)^2 + (0,5 - d_3)^2}}{\sqrt{1,5}} \right) \right] \quad (5)
\end{aligned}$$

Hasil pengukuran IIK akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Kategori berikut adalah:<sup>19</sup>

1.  $0.6 < \text{IIK} \leq 1$  Tinggi
2.  $0.3 < \text{IIK} \leq 0.6$  Menengah
3.  $0.0 \leq \text{IIK} \leq 0.3$  Rendah

### 3.5.2 Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Syariah pada UMKM

#### 3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat digunakan adalah dengan uji statistik menggunakan uji non parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov >

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 25

0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Normalitas juga dapat dilihat secara visual melalui Normal P-P Plot. Ketentuannya, jika titik-titik masih berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal.<sup>20</sup>

#### 3.5.2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengujian pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM menggunakan Analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

---

<sup>20</sup>Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 57

penurunan. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Syariah pada Sektor  
UMKM

X = Indeks Inklusi Keuangan Syariah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Indeks inklusi keuangan syariah merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah. Indeks inklusi keuangan syariah ini akan digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Perhitungan indeks inklusi keuangan dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Sarma.

##### 4.1.1. Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi Keuangan dibentuk oleh 3 dimensi yaitu penetrasi perbankan (*aksesibilitas*), ketersediaan jasa perbankan (*availabilitas*), dan penggunaan jasa perbankan (*usage*).<sup>1</sup> Ketiga dimensi diukur berdasarkan data perbankan syariah pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. Dimensi ini merupakan nilai rasio dari masing-masing indikator tiap dimensi. Dengan keterbatasan data yang dimiliki, nilai

---

<sup>1</sup>Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No. 07, 2012, h. 1-32

dimensi pembentuk inklusi keuangan syariah tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1. Hasilnya menunjukkan beberapa indikator seperti: minimum (*min*), maksimum (*max*), rata-rata (*ave.*), dan standar deviasi (*stdev*).

Tabel 4.1

## Statistik Deskriptif Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Statistik Deskriptif Dimensi Inklusi Keuangan Syariah					
	2015	2016	2017	2018	Average
<b><i>Dimensi</i></b>					
<b><i>Aksesibilitas (<math>A_1</math>)</i></b>					
<i>Min</i>	0,035	0,034	0,032	0,036	0,034
<i>Max</i>	14,780	17,409	20,664	22,089	18,736
<i>Ave.</i>	<b>1,009</b>	<b>1,248</b>	<b>1,464</b>	<b>1,630</b>	<b>1,338</b>
<i>Stdev.</i>	2,494	3,005	3,584	3,806	3,222
<b><i>Dimensi</i></b>					
<b><i>Availabilitas (<math>A_2</math>)</i></b>					
<i>Min</i>	0,120	0,120	0,120	0,110	0,118
<i>Max</i>	4,170	4,500	4,540	4,700	4,478
<i>Ave.</i>	<b>1,219</b>	<b>1,165</b>	<b>1,139</b>	<b>1,166</b>	<b>1,172</b>
<i>Stdev.</i>	0,732	0,910	0,884	0,916	0,860
<b><i>Dimensi Usage</i></b>					
<b><i>(<math>A_3</math>)</i></b>					
<i>Min</i>	0,237	0,219	0,172	0,164	0,198
<i>Max</i>	4,474	9,697	9,690	9,320	8,295
<i>Ave.</i>	<b>1,314</b>	<b>1,568</b>	<b>1,631</b>	<b>1,754</b>	<b>1,567</b>

<i>Stdev.</i>	0,882	1,719	1,760	1,882	1,561
<hr/> <i>Keterangan:</i>					
<i>Min</i> : Nilai Minimum	<i>Average</i> : Nilai Rata-rata				
<i>Max</i> : Nilai Maksimum	<i>Stdev</i> : Standar Deviasi				

Sumber: Hasil olah data, 2019

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Salah satu indikator yang mewakili ukuran ini adalah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah per 1000 penduduk dewasa. Penelitian ini menggunakan rasio DPK perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tiap provinsi terhadap 1000 penduduk dewasa selama periode 2015-2018. Rata-rata total jumlah DPK perbankan syariah per 1000 penduduk dewasa di Indonesia periode 2015-2018 adalah sekitar 1,338 milyar rupiah (Lihat Tabel 4.1). Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata jumlah DPK perbankan syariah tertinggi

dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 18,736 milyar rupiah per 1000 penduduk dewasa.

Selain penetrasi perbankan (*aksesibilitas*), ketersediaan jasa perbankan (*availabilitas*) juga digunakan untuk mengukur inklusi keuangan yang menggambarkan jangkauan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan perbankan. Indikator dari ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah outlet (baik itu kantor, kantor cabang, ATM, dan sebagainya). Tersedianya kantor cabang perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukkan penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran kantor cabang perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan semakin tinggi.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan jumlah kantor perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tiap provinsi per 100.000 penduduk dewasa untuk mengukur dimensi *availabilitas*.

---

<sup>2</sup>Bintan Badriatul Ummah *et al.*, *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 4 No 1, 2015, h. 16

Pada tahun 2015-2018, rata-rata jumlah kantor perbankan syariah untuk melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebanyak 1,17 unit atau dengan kata lain tersedia 11 unit untuk melayani 1 juta penduduk (Lihat Tabel 4.1). Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang minim terkait dengan ketersediaan layanan perbankan syariah di daerah. Dari 33 provinsi yang ada, provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 dan Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2016-2018 menempati posisi teratas tingkat ketersediaan layanan perbankan syariah dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 4,4 unit per 100.000 penduduk atau tersedia 44 unit per 1 juta penduduk dewasa.

Akses terhadap jasa keuangan perbankan tidaklah cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif karena banyak orang yang memiliki akses terhadap jasa perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut. Keberadaan jasa keuangan harus mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, indikator dimensi penggunaan (*usage*) ini juga dimasukkan ke dalam pengukuran sistem keuangan yang

inklusif. Dalam penelitian ini, indikator *usage* dilihat dari proporsi jumlah pembiayaan perbankan syariah terhadap nilai PDRB tiap provinsi selama periode 2015-2018. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pembiayaan terhadap PDRB per provinsi adalah sekitar 1,5 milyar rupiah (Lihat Tabel 4.1). Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata kontribusi pembiayaan terhadap PDRB tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 8,29 milyar rupiah.

#### 4.1.2. Indeks Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Sebelum menghitung indeks inklusi keuangan syariah, masing-masing dimensi dihitung untuk mendapatkan nilai indeks dimensi. Nilai indeks dimensi menunjukkan nilai setiap dimensi yang dicapai oleh keuangan syariah. Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut.<sup>3</sup>

Dalam menghitung nilai indeks dimensi, setiap dimensi memerlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,... h. 9

Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan juga memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Bobot, batas atas dan batas bawah yang digunakan untuk menghitung indeks ketiga dimensi inklusi keuangan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2

Data Perhitungan Indeks Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Dimensi ( $d_i$ )	Bobot ( $W_i$ )	Batas Bawah ( $m_i$ )	Batas Atas ( $M_i$ )			
			2015	2016	2017	2018
Penetrasi Perbankan ( $d_1$ )	1	0	14,780	17,409	20,664	22,089
Ketersediaan Jasa Keuangan ( $d_2$ )	0,5	0	4,170	4,500	4,540	4,700
Penggunaan ( $d_3$ )	0,5	0	4,474	9,697	9,690	9,320

Sumber: Hasil olah data, 2019

Penentuan nilai *maksimum* (batas atas) dan nilai *minimum* (batas bawah) yang digunakan adalah berdasarkan data 33 provinsi di Indonesia. Batas bawah atau nilai *minimum* ( $m_i$ ) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan

batas atas atau nilai *maksimum* ( $M_i$ ) untuk setiap dimensi diwakili oleh nilai *maksimum* data yang tersedia. Statistik deskriptif nilai indeks dimensi inklusi keuangan syariah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Indeks Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

<b>Statistik Deskriptif Indeks Dimensi Inklusi Keuangan Syariah</b> <b>(<math>d_i</math>)</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Indeks Aksesibilitas</b> <b>(<math>d_1</math>)</b>				
<i>Min</i>	0,002	0,002	0,002	0,002
<i>Max</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Ave.</i>	<b>0,068</b>	<b>0,072</b>	<b>0,071</b>	<b>0,074</b>
<i>Stdev</i>	0,169	0,173	0,173	0,172
<b>Indeks Availabilitas</b> <b>(<math>d_2</math>)</b>				
<i>Min</i>	0,014	0,013	0,013	0,012
<i>Max</i>	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Ave.</i>	<b>0,146</b>	<b>0,129</b>	<b>0,125</b>	<b>0,124</b>
<i>Stdev</i>	0,088	0,101	0,097	0,097
<b>Indeks Usage (<math>d_3</math>)</b>				
<i>Min</i>	0,026	0,011	0,009	0,009
<i>Max</i>	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Ave.</i>	<b>0,147</b>	<b>0,081</b>	<b>0,084</b>	<b>0,094</b>
<i>Stdev</i>	0,099	0,089	0,091	0,101
<b>Keterangan:</b>				
<i>Min</i> : Nilai Minimum	<i>Average</i> : Nilai Rata-rata			



*Max* : Nilai Maksimum     *Stdev*     : Standar Deviasi

---

Sumber: Hasil olah data, 2019

---

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3, dari 33 provinsi di Indonesia, secara rata-rata capaian indeks dimensi *aksesibilitas* mengalami kenaikan selama periode tahun 2015-2018. Dari 0,068 tahun 2015 menjadi 0,074 pada tahun 2018. Meskipun kenaikan nilai indeks *aksesibilitas* tidak begitu signifikan tetapi hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat pada jasa keuangan syariah semakin baik. Berbeda dengan nilai indeks *aksesibilitas* yang mengalami kenaikan setiap tahun, nilai indeks *availabilitas* dan *usage* mengalami penurunan selama periode penelitian.

Dari proporsi tiga dimensi penyusun indeks inklusi keuangan syariah pada tabel 4.3 di atas, indeks *availabilitas* memiliki nilai rata-rata (*average*) paling baik selama periode tahun 2015-2018, diikuti oleh dimensi *usage* kemudian *aksesibilitas*. Hasil ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi *availabilitas* dan *usage*. Sementara dimensi *aksesibilitas* memiliki

proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya meskipun selama periode penelitian selalu mengalami kenaikan.

Nilai indeks *availabilitas* yang lebih tinggi dari indeks *aksesibilitas* menunjukkan bahwa dengan tersedianya kantor layanan perbankan syariah di 33 provinsi Indonesia, masyarakat masih mengalami keterbatasan akses untuk menjangkau jasa keuangan karena beberapakendala yang dialami yaitu tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal.<sup>4</sup> Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal dan memiliki pendapatan yang tidak menentu. Bagi lembaga formal seperti bank, pendapatan tetap dan pasti dari nasabah menjadi jaminan bagi keberlangsungan usahanya, karena itu masyarakat yang memiliki pendapatan tidak menentu dianggap sebagai *unbankable*

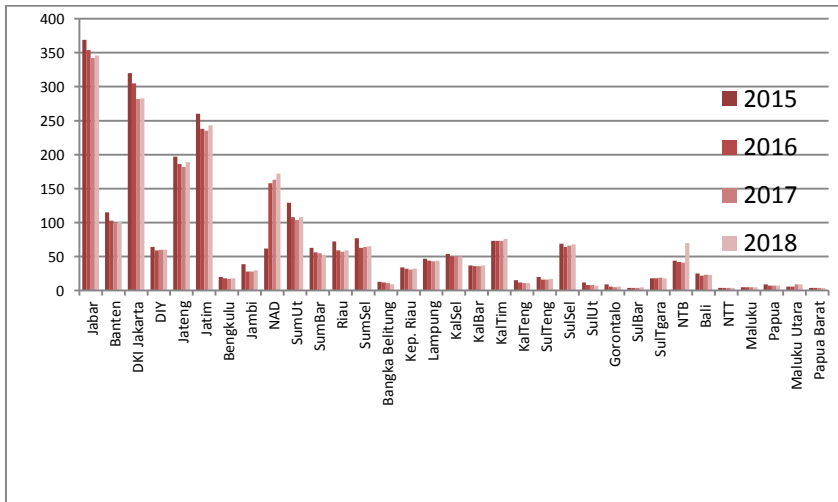
---

<sup>4</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, “*Booklet Keuangan Inklusif*”, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Pages/Booklet-Kuangan-Inklusif.aspx> diakses 22 januari 2019

people sulit untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal.<sup>5</sup>

Grafik 4.1

Jumlah Kantor Layanan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Tahun 2015-2018



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah 2019

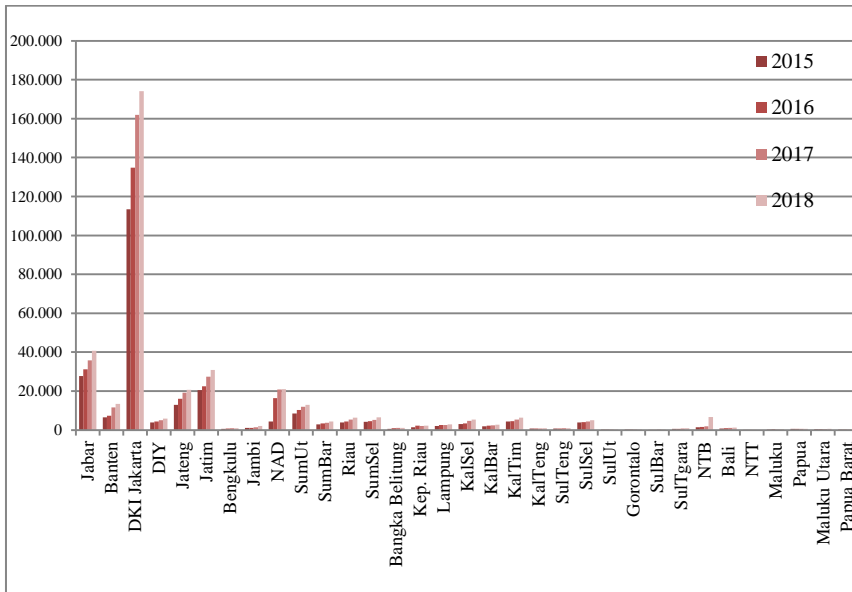
Kantor layanan bank syariah di 33 provinsi Indonesia telah berdiri dan beroperasi (Lihat Grafik 4.1). Dengan tersedianya kantor-kantor bank syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang

<sup>5</sup>I Made Sanjaya, *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Tesis. Institut Pertanian Bogor, 2014, h. 33

dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukan penyebaran layanan keuangan. Semakin banyak dan semakin terbarnya lokasi-lokasi kantor cabang bank maka jangkauan layanan keuangan akan semakin tinggi. Meskipun kantor bank syariah telah tersedia di seluruh indonesia, jumlah DPK yang mencerminkan kepemilikan rekening baik tabungan maupun deposito masyarakat pada perbankan syariah masih belum merata (Grafik 4.2). Terjadi selisih yang sangat besar antara jumlah DPK perbankan syariah provinsi DKI Jakarta dengan 32 provinsi lainnya. jumlah DPK DKI Jakarta memiliki nominal rata-rata selama periode 2015-2018 lebih dari 130 triliun. Sedangkan padaprovinci lainnya hanya berkisar antara 100 milyar-20 triliun.

Grafik 4.2

Jumlah DPK Perbankan Syariah Tahun 2015-2018



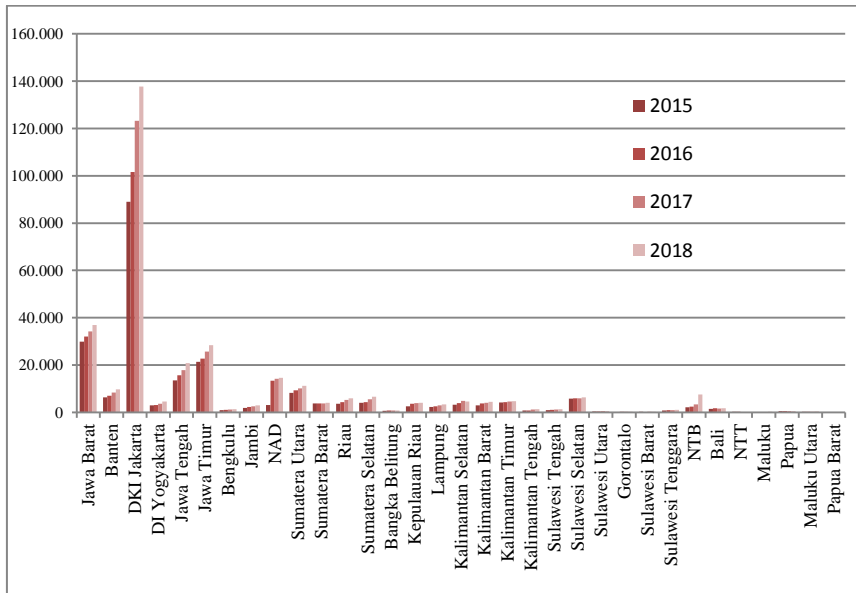
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah  
2019

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan perbankan syariah yang dinilai dari jumlah DPK dikawasan Indonesia timur masih relatif jauh lebih rendah daripada provinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia. DPK perbankan syariah yang tidak merata mengakibatkan tingkat rata-rata indeks inklusi keuangan syariah dari dimensi *aksesibilitas* yang diukur dari rasio jumlah DPK perbankan baik pada Bank Umum Syariah, Unit

Usaha maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 1.000 penduduk dewasa relatif rendah.

Grafik 4.3

Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2015-2018



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah  
2019

Sama halnya dengan tingkat *aksesibilitas* yang rendah, ketersediaan jasa perbankan (*availabilitas*) yang tinggi cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan formal sebagai sumber utama pembiayaan. Hal tersebut

dikarenakan berbagai alasan seperti jarak yang cukup jauh untuk menjangkau bank terdekat, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa.<sup>6</sup> Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh world bank, Hanya 17% dari total penduduk Indonesia yang meminjam dari bank, dan sekitar sepertiga lainnya meminjam dari sektor informal. Alasan utama untuk tidak meminjam adalah karena ketidaklengkapan dokumen yang mengindikasikan ketidaktersediaannya jaminan sebagai masalah kedua. Pinjaman bukan merupakan prioritas utama. Penggunaan kredit atau pembiayaan masih sangat terkonsentrasi pada sektor informal seperti pinjaman dari majikan, keluarga, teman, dan lainnya.<sup>7</sup> Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menggunakan jasa keuangan yang dominan pada institusi keuangan non-formal daripada fasilitas perbankan formal

---

<sup>6</sup>Bintan Badriatul Ummah *et al.*, Analisis..., h. 17

<sup>7</sup>Bank Dunia, *Meningkatkan Akses Terhadap Jasa Keuangan di Indonesia: Ringkasan Eksekutif*, h. 2-3

<http://documents.worldbank.org/curated/en/372831468039054109/pdf/520320WP0v10BA10Box345548B01PUBLIC1.pdf> diakses 22 Januari 2019

mengindikasikan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia tidak berfungsi dengan baik.<sup>8</sup>

#### 4.1.3. Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada 33 provinsi di Indonesia

Indeks inklusi keuangan syariah dapat dilihat dari tiga dimensi inklusi keuangan. Seberapa besar indeks dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan perbankan menentukan besar indeks inklusi keuangan.<sup>9</sup> Grafik 4.4 menyajikan nilai Indeks Inklusi Keuangan (IIK) syariah pada 33 provinsi di Indonesia. Secara sederhana, provinsi dibagi menjadi tiga kategori dalam pengukuran IIK: provinsi dengan IIK yang rendah untuk provinsi yang memiliki nilai indeks kurang dari 0,3; provinsi dengan nilai IIK sedang untuk provinsi yang memiliki nilai IIK antara 0,3 dan 0,6, dan provinsi dengan nilai IIK yang tinggi untuk provinsi yang memiliki nilai IIK antara 0,6 dan 1.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Azwar Iskandar Umar, *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017, h. 119

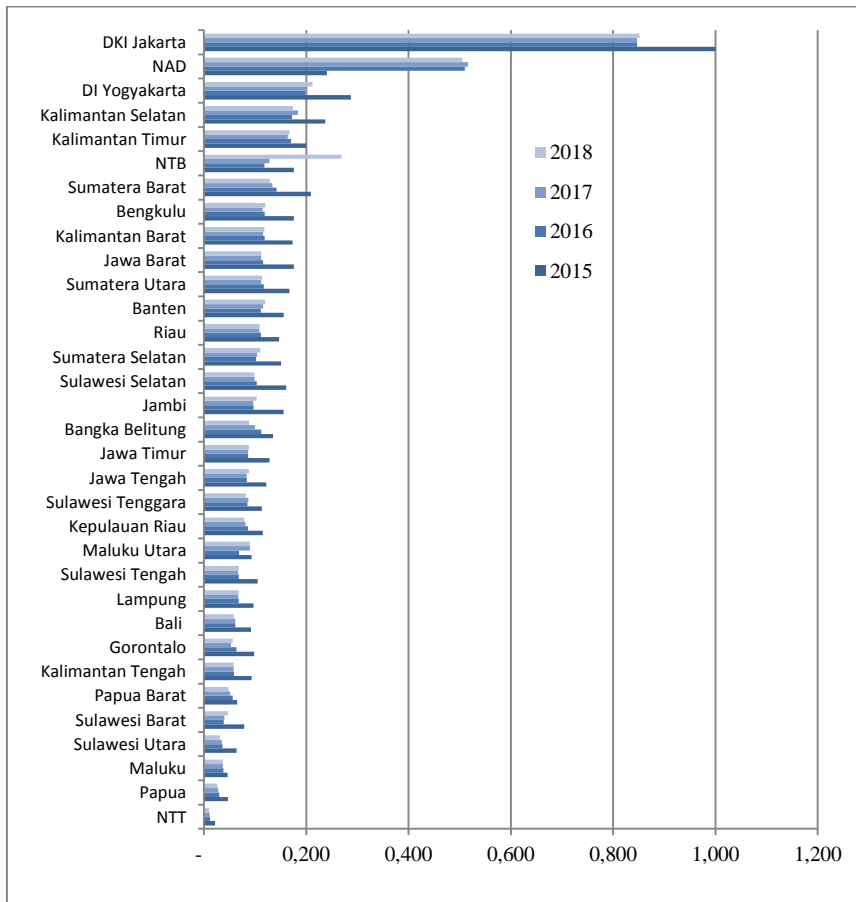
<sup>9</sup>Mandira Sarma dan Jesim Pais, *Financial Inclusion and Development: a Cross Country Analysis*, 2010

<sup>10</sup>Mandira Sarma, *Index...* 2012



Grafik 4.4

Peringkat Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada 33 provinsi di  
Indonesia Tahun 2015-2018



Sumber: Hasil olah data, 2019

Grafik 4.5 menunjukkan nilai indeks tertinggi dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta. pada tahun 2015, provinsi ini mencatat nilai IIK

syariah yang sangat tinggi yaitu sebesar 1. Seperti halnya pada tahun 2015, pada tahun 2016-2018 provinsi DKI Jakarta memiliki nilai IIK syariah tertinggi dengan nilai indeks berturut-turut sebesar 0,847; 0,847 dan 0,852. Sedangkan indeks terendah dimiliki oleh provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2015-2018 dengan nilai IIK syariah berturut-turut 0,022; 0,012; 0,011 dan 0,010. Berdasarkan nilai indeks inklusi keuangan syariah, tingkat keinklusan keuangan syariah di pulau Jawa lebih rendah dari pulau kalimantan dan sumatera. Jika dilihat dari jumlah DPK, kantor bank dan jumlah pembiayaan perbankan syariah, pulau jawarelatif lebih tinggi dibanding kalimantan dan sumatera, akan tetapi nilai indeks inklusi keuangan syariah di pulau Jawa relatif lebih rendah hal ini dikarenakan jumlah DPK perbankan syariah yang mewakili jumlah rekening, jumlah kantor bank, maupun jumlah pembiayaan perbankan syariahtidak sebanding dengan jumlah populasi yang ada di pulau Jawa.

Tabel 4.4

Indeks Inklusi Keuangan Syariah pada 33  
Provinsi di Indonesia

Provinsi	2015	2016	2017	2018	Average
Jawa Barat	0,176	0,116	0,112	0,112	0,129
Banten	0,156	0,111	0,116	0,120	0,126
DKI Jakarta	1,000	0,847	0,847	0,852	0,887
DI Yogyakarta	0,287	0,198	0,201	0,212	0,225
Jawa Tengah	0,122	0,084	0,084	0,088	0,095
Jawa Timur	0,128	0,086	0,086	0,088	0,097
Bengkulu	0,176	0,119	0,115	0,120	0,133
Jambi	0,156	0,097	0,096	0,103	0,113
NAD	0,240	0,510	0,516	0,505	0,443
Sumatera Utara	0,167	0,117	0,112	0,114	0,128
Sumatera Barat	0,209	0,142	0,134	0,129	0,154
Riau	0,147	0,111	0,108	0,109	0,119
Sumatera Selatan	0,151	0,102	0,104	0,110	0,117
Bangka					
Belitung	0,135	0,112	0,100	0,089	0,109
Kepulauan Riau	0,115	0,086	0,081	0,079	0,090
Lampung	0,097	0,068	0,067	0,068	0,075
Kalimantan Selatan	0,237	0,172	0,184	0,174	0,192
Kalimantan Barat	0,173	0,119	0,116	0,118	0,132
Kalimantan Timur	0,200	0,170	0,164	0,167	0,175
Kalimantan Tengah	0,093	0,059	0,058	0,058	0,067
Sulawesi Tengah	0,105	0,068	0,067	0,068	0,077

Sulawesi Selatan	0,161	0,103	0,099	0,099	0,116
Sulawesi Utara	0,064	0,036	0,035	0,031	0,042
Gorontalo	0,098	0,064	0,053	0,056	0,068
Sulawesi Barat	0,079	0,039	0,040	0,047	0,051
Sulawesi Tenggara	0,113	0,085	0,087	0,082	0,092
NTB	0,176	0,118	0,128	0,269	0,173
Bali	0,092	0,061	0,061	0,059	0,068
NTT	0,022	0,012	0,011	0,010	0,014
Maluku	0,046	0,038	0,037	0,037	0,040
Papua	0,047	0,030	0,028	0,026	0,033
Maluku Utara	0,093	0,069	0,090	0,090	0,086
Papua Barat	0,065	0,056	0,051	0,048	0,055
<b>Average total</b>	<b>0,161</b>	<b>0,127</b>	<b>0,127</b>	<b>0,131</b>	<b>0,137</b>

Sumber: Hasil olah data, 2019

Hasil Perhitungan indeks inklusi keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta dikategorikan sebagai provinsi dengan indeks paling tinggi yaitu memiliki rata-rata nilai indeks selama periode penelitian tahun 2015-2018 sebesar 0,887. Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat inklusi keuangan tertinggi di antara provinsi yang lainnya karena tingginya ketiga dimensi dari inklusi keuangan. Provinsi yang termasuk dalam indeks inklusi keuangan syariah sedang adalah Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD) dengan indeks sebesar 0,443. Mulanya provinsi ini berada pada posisi rendah, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dan masuk ke dalam posisi sedang. Hal ini karena dimensi *availabilitas* (ketersediaan perbankan) dan dimensi *usage* (Penggunaan jasa perbankan) Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 0,5 atau pada posisi sedang pada tahun 2016-2018.

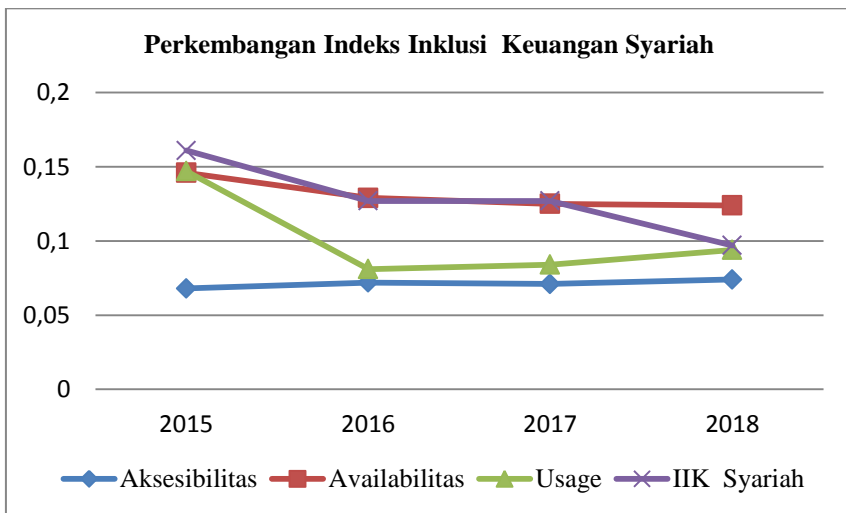
Apabila dilihat dari sebaran ketiga dimensi inklusi keuangan syariah, provinsi DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Akibatnya tingkat inklusi keuangan semua provinsi terlihat jauh lebih buruk. Tetapi jika Jakarta dikeluarkan dalam perhitungan, nilai dari indeks inklusi keuangan setiap provinsi terlalu besar. Sedangkan 31 Provinsi lainnya selain DKI Jakarta dan NAD tergolong pada tingkat IIK syariah rendah.

Nilai rata-rata indeks inklusi keuangan syariah yang dicapai oleh Indonesia adalah sebesar 0,139. Artinya, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masuk dalam kategori rendah selama periode 2015-2018. Terjadinya penurunan indeks inklusi keuangan syariah pada

sebagian besar provinsi di Indonesia menyebabkan rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, hanya terdapat satu provinsi dengan nilai indeks yang masuk dalam kategori tinggi di Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam hal inklusifitas sektor keuangan syariah selama periode tersebut.

Grafik 4.5

Perkembangan Indeks Inklusi Keuangan Syariah  
Periode 2015-2018



Sumber: Hasil olah data, 2019

Seperti yang ditunjukkan pada grafik 4.5, indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018. Pada tahun 2015 indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia mencapai 0,161 dan menurun menjadi 0,131 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan inklusivitas jasa keuangan syariah di Indonesia selama 4 tahun. Penurunan inklusi keuangan syariah di Indonesia, dikarenakan adanya penurunan dari setiap dimensi inklusi keuangan kecuali penetrasi perbankan (*aksesibilitas*).

#### 4.2 Pembiayaan Syariah Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Selama tahun 2015 sampai 2018 nominal pembiayaan syariah yang disalurkan perbankan syariah pada sektor UMKM terus meningkat namun persentase kontribusi pembiayaan syariah sektor UMKM masih lebih kecil daripada sektor non-UMKM. Porsi pembiayaan syariah pada UMKM yang disalurkan terhadap total pembiayaan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Proporsi Pembiayaan Syariah Sektor UMKM dan non  
UMKM Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah  
(Milyar)

	2015		2016		2017		2018	
Pembiayaan	Nominal	persen	Nominal	Persen	Nominal	Persen	Nominal	Persen
Sektor								
UMKM	53.669	24,53%	58.101	22,81%	62.747	21,38%	66.315	20,14%
Sektor non								
UMKM	165.092	75,47%	196.568	77,19%	230.711	78,62%	262.962	79,86%
Total								
Pembiayaan	218.761	100%	254.670	100%	293.459	100%	329.277	100%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah 2019

Sampai dengan desember 2018, proporsi penyaluran pembiayaan syariah pada sektor UMKM terhadap total pembiayaan syariah adalah sebesar 20,14 persen. Angka ini hanya seperempat dari jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa layanan keuangan yang tersedia belum dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan maksimal oleh UMKM yang ada. Melalui indeks penggunaan (*usage*) dalam penyusunan indeks inklusi keuangan syariah pada penelitian ini, didapatkan hasil yang mendukung hal tersebut. Rata-rata nilai indeks penggunaan (*usage*) layanan keuangan oleh masyarakat di Indonesia selama 2015-2018 hanya sebesar 0,099 dari skala 1.

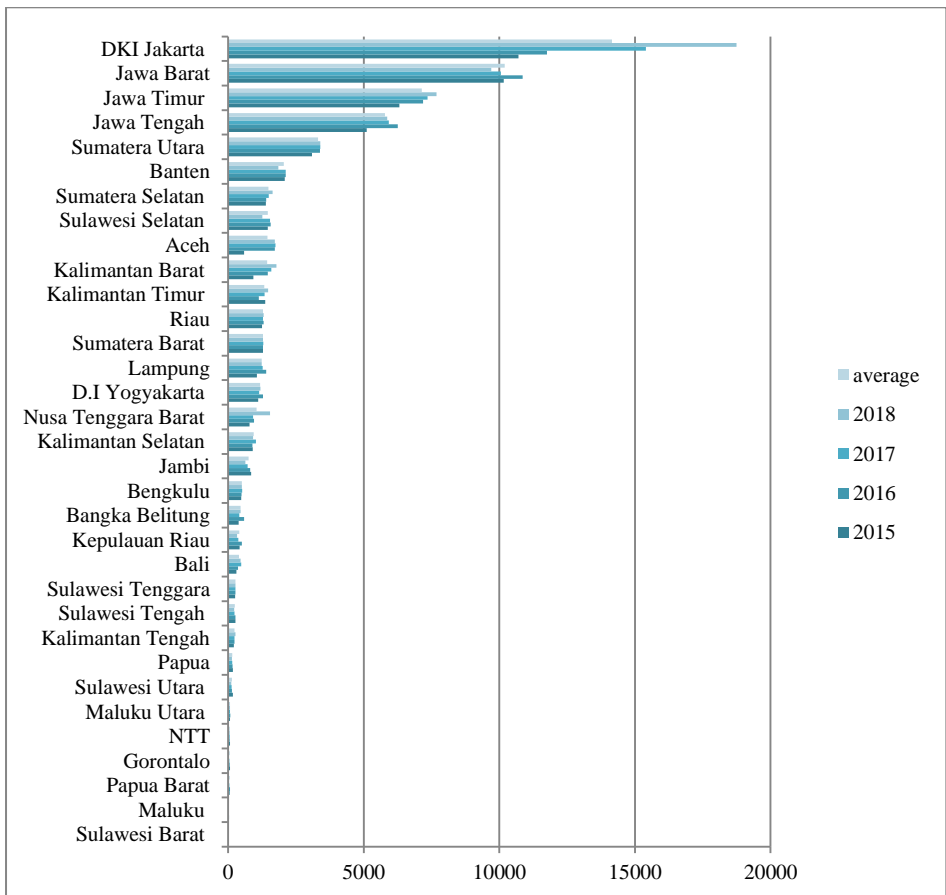
Provinsi dengan nominal pembiayaan syariah pada sektor UMKM tertinggi 2015-2018 didominasi oleh provinsi-provinsi di kawasan pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan termasuk DKI Jakarta),



hanya satu di luar pulau Jawa yakni Sumatera Utara. Sementara nominal terendah didominasi kawasan Indonesia Timur (maluku utara, NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku dan sulawesi utara).

Grafik 4.6

Pembiayaan Syariah pada sektor UMKM 2015-2018



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah 2019

Meskipun jumlah nominal pembiayaan syariah tertinggi didominasi oleh pulau jawa termasuk DKI Jakarta, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor UMKM tertinggi dicapai oleh provinsi luar jawa yaitu Aceh, NTB dan Kalimantan Barat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 20-60%. Bahkan dari tahun 2015 ke 2018 Aceh mengalami pertumbuhan pembiayaan syariah secara drastis dengan nilai pertumbuhan hampir 200%. Lihat Tabel 4.6

Tabel 4.6  
Pertumbuhan Pembiayaan Syariah sektor UMKM  
2015-2018 (Milyar rupiah)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	Growth 2015 ke 2018	Rata- rata Growth per Tahun
Aceh	595,5	1.728,47	1.752,54	1.726,83	190,0%	63,4%
Nusa Tenggara Barat	792,8	957,13	924	1.544,17	94,8%	28,1%
Kalimantan Barat	927,57	1.468,67	1.594,58	1.781,99	92,1%	26,2%
DKI Jakarta	10.701,3	11.752,3	15.398,2	18.744,2	75,2%	20,9%
Bali	310,06	371,44	482,2	463,71	49,6%	15,3%

Bangka Belitung	390,07	590,15	411,74	466,16	19,5%	11,4%
Kalimantan Tengah	217,92	233,99	233,62	268,93	23,4%	7,4%
Jawa Timur	6.315,81	7.191,42	7.354,90	7.683,86	21,7%	6,9%
Lampung	1.068,08	1.406,73	1.271,56	1.237,06	15,8%	6,5%
Sumatera Selatan	1.390,62	1.406,34	1.494,15	1.639,88	17,9%	5,7%
Jawa Tengah	5.105,61	6.250,89	5.920,69	5.872,21	15,0%	5,4%
Kalimantan Timur	1.370,14	1.131,95	1.343,17	1.477,38	7,8%	3,8%
Sumatera Utara	3.088,29	3.392,24	3.397,70	3.405,68	10,3%	3,4%
D.I Yogyakarta	1.110,47	1.282,02	1.148,30	1.188,57	7,0%	2,8%
Maluku Utara	69,75	82,37	68,28	72,71	4,2%	2,5%
Bengkulu	480,59	502,25	525,14	514,08	7,0%	2,3%
Riau	1.251,43	1.313,87	1.291,37	1.315,63	5,1%	1,7%
Sulawesi Tenggara	265,48	268,68	266,46	273,62	3,1%	1,0%
Kalimantan Selatan	914,34	899,81	1.027,10	919,55	0,6%	0,7%
Sumatera Barat	1.284,15	1.292,38	1.303,58	1.286,13	0,2%	0,1%
Jawa Barat	10.157,3	10.859,1	10.062,3	9.708,49	-4,4%	-1,3%
Banten	2.093,28	2.121,18	2.129,62	1.858,55	-11,2%	-3,7%
Sulawesi Selatan	1.461,12	1.574,55	1.541,37	1.258,10	-13,9%	-4,2%

Kepulauan Riau	423,7	512,14	381,69	335,15	-20,9%	-5,6%
NTT	73,02	65,49	54,83	59,04	-19,1%	-6,3%
Sulawesi Tengah	276,44	273,14	232,08	220,45	-20,3%	-7,1%
Papua	179,11	165,68	155,17	137,52	-23,2%	-8,4%
Jambi	847,27	819,66	715,37	643,75	-24,0%	-8,7%
Sulawesi Barat	20,75	14,57	16,91	14,21	-31,5%	-9,9%
Sulawesi Utara	173,93	142,79	130,55	114,5	-34,2%	-12,9%
Papua Barat	63,77	73,51	53,27	33,62	-47,3%	-16,4%
Maluku	30,95	25,32	14,92	14,31	-53,8%	-21,1%
Gorontalo	74,67	64,79	49,85	35,28	-52,8%	-21,8%

---

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, diolah 2019

Pada sebagian besar provinsi di Indonesia, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor UMKM mengalami perkembangan setiap tahunnya. Tampak bahwa perhatian perbankan khususnya pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM di Indonesia semakin tinggi. Dengan demikian keseriusan pembiayaan perbankan syariah untuk ikut mendukung peningkatan kinerja UMKM pada beberapa provinsi sudah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Tetapi terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan jumlah pembiayaan pada UMKM. Provinsi

jawa barat memiliki jumlah pembiayaan syariah pada sektor UMKM dengan nominal besar. Akan tetapi tidak mengalami perkembangan setiap tahunnya karena nominal pembiayaan pada sektor UMKM selalu menurun. Provinsi papua barat, maluku dan gorontalo menempati posisi terbawah yang mengalami penurunan jumlah nominal pembiayaan pada sektor UMKM dengan rata-rata penurunan tiap tahunnya mencapai 21,8%. Kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil terutama mendorong pertumbuhan sektor riil pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi.<sup>11</sup>

#### 4.3 Analisis Data

##### 4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data diambil dari populasi normal atau data yang dikumpulkan berdistribusi

---

<sup>11</sup>Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ahkam:Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 315-322

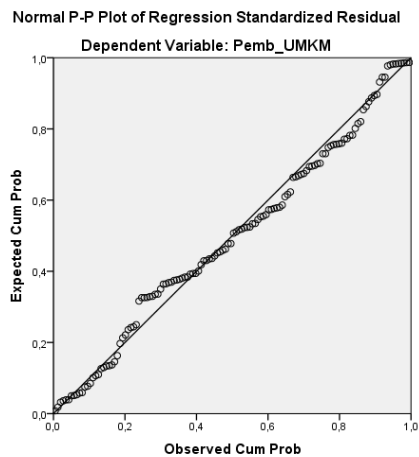
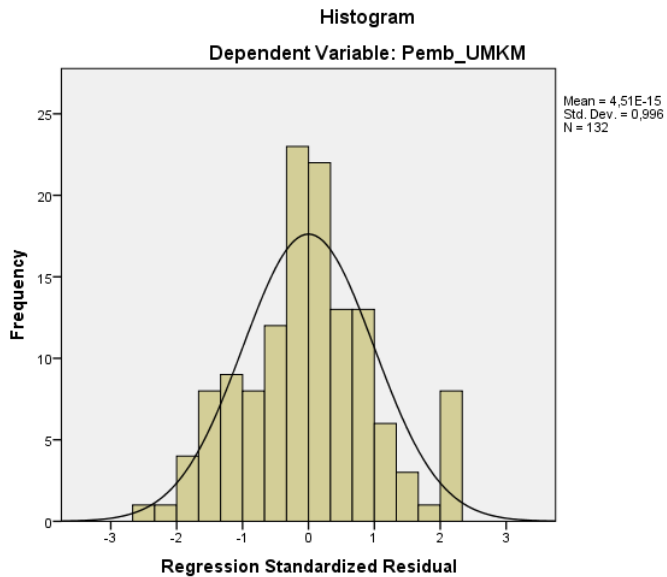
normal.<sup>12</sup> Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel yang diselidiki yaitu indeks inklusi keuangan syariah dan pembiayaan syariah pada sektor UMKM memiliki penyebaran yang berdistribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode analisis grafik, baik secara *normal probability plot* atau grafik histogram dan dengan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

#### Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Histogram dan P-Plot

---

<sup>12</sup>Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 57



Sumber: Hasil output SPSS, diolah 2019

Dari grafik normalitas diatas menunjukan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, sehingga model tersebut dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,53806649
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,058
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,026 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2019

Berdasarkan output SPSS diatas, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,26, lebih besar dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini



berdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

#### 4.3.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah regresi linier yang mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan satu variabel independen untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel dependen.<sup>13</sup> Sedangkan analisis regresi linier sederhana adalah teknik statistika untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>14</sup> Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh indeks inklusi keuangan syariah dengan pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM.

##### 4.3.2.1. Uji Hipotesis

Hipotesis diuji untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak. Adapun pengujian hipotesis pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah

---

<sup>13</sup>Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS*, Yogyakarta: Andi, 2006, h. 116

<sup>14</sup>Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis....* h. 45

yang disalurkan pada sektor UMKM dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan probabilitas 0,05.<sup>15</sup> Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Gambar 4.3

Hasil Uji Hipotesis

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,273	,151		28,311	,000
IIK_Syariah	1,499	,143	,677	10,496	,000

a. Dependent Variable: Pemb\_UMKM

Sumber: Output SPSS, 2019

Didasarkan pada hasil output SPSS diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Angka 0,000 < 0,05 itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, ada pengaruh antara indeks inklusi keuangan syariah (X) terhadap pembiayaan syariah yang

---

<sup>15</sup>*Ibid..h.* 63

disalurkan pada sektor UMKM (Y). Dilihat dari nilai output diatas, indeks inklusi keuangansyariah adalah positif sehingga dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM.

#### 4.3.2.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil output SPSS menunjukkan:

Gambar 4.4

Koefisien Determinasi

#### **Model Summary<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,677 <sup>a</sup>	,459	,455	,54013

a. Predictors: (Constant), IIK\_Syariah

b. Dependent Variable: Pemb\_UMKM

Sumber: Output SPSS, 2019

Angka koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam perhitungan diatas adalah sebesar 0,459 atau sama dengan 45,9%. Artinya, sebesar 45,9% pembiayaan syariah pada sektor UMKM dapat dijelaskan dengan menggunakan indeks inklusi keuangan syariah. Besarnya pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM adalah 45,9% sedangkan sisanya yaitu 54,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi ini.

#### 4.4 Pembahasan

Berdasarkan pada analisis data membuktikan bahwa variabel indeks inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap variabel pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor usaha UMKM dengan nilai koefisien determinasi sebesar 45,9% sedangkan sisanya 50,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian.

Dari hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM. Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan syariah pada sektor UMKM dapat dijelaskan oleh dana pihak ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, BOPO, Financing Deposit Ratio, Equivalent Rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK) dan Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (BSBIS).<sup>16</sup> Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah pada sektor UMKM di Indonesia juga dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan likuiditas.<sup>17</sup> Faktor-faktor tersebut hendaknya diperhatikan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan syariah sehingga pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM dapat mendorong perekonomian di Indonesiamelalui UMKM.

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah pada

---

<sup>16</sup>Tamara Yuanita Muji Mardani, *Analisis Fakor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah Untuk Sektor UMKM di Indonesia*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor, 2016.

<sup>17</sup>Risna Destiana, *Analisis Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol. 2 Isue 1, Februari 2016, h. 15 - 28

sektor UMKM dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya,  $H_1$  yang menyatakan bahwa variabel indeks inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM dapat diterima.

Menurut Ummah, semakin inklusif sistem keuangan suatu wilayah, maka wilayah tersebut telah berhasil mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan dalam mengakses jasa keuangan. Dengan demikian wilayah yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang tinggi berarti bahwa wilayah tersebut telah berhasil menjangkau masyarakatnya untuk dapat mengakses layanan jasa keuangan seperti perbankan sehingga mereka mampu memanfaatkan produk-produk perbankan untuk mengelola kondisi keuangannya dengan tujuan mencapai hidup yang lebih sejahtera.<sup>18</sup> Kaitannya dengan pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM adalah ketika indeks inklusi keuangan syariah naik, maka pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM di Indonesia cenderung meningkat. Dengan kata lain, provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan syariah tinggi dimana masyarakatnya memiliki akses dalam memanfaatkan layanan perbankan, menyalurkan

---

<sup>18</sup>Bintan Badriatul Ummah *et al.*, *Analisis....* h. 17

pembiayaan syariah pada sektor UMKM cenderung lebih tinggi.

Indeks inklusi keuangan syariah yang tercapai berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun, dan tersedianya layanan kantor bank disetiap wilayah per penduduk dewasa, serta banyaknya proporsi pembiayaan terhadap pdrb provinsi berpengaruh pada jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmy *et al.* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang diukur dari dimensi akses dengan menggunakan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa dan dimensi penggunaan yang diukur dari rasio jumlah dana pihak ketiga per 1000 penduduk dewasa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol LDR dan NPL yang menunjukkan bahwa LDR secara bersama-sama dengan variabel akses dan variabel penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan NPL mempunyai arah negatif namun tidak signifikan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Obaid M Fahmy *et al.*, *Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 118 - 135

Didukung dengan penelitian lain, seperti penelitian Aldila, dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia.<sup>20</sup> Hasil serupa juga ditemukan oleh penelitian Puspitasari, Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum Konvensional di Indonesia.<sup>21</sup> Selain dana pihak ketiga, tersedianya kantor layanan bank syariah dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk akses permodalan, menyimpan dana, untuk sarana transaksi. Perkembangan kredit yang disalurkan pada sektor UMKM tidak terlepas dari kemudahan UMKM untuk mengakses layanan jasa keuangan syariah dengan tersedianya kantor layanan bank syariah. Oleh karena itu inklusi keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan syariah terutama oleh perbankan syariah. Salah satunya dalam bentuk kerjasama menggunakan konsep *linkage*, dimana bank syariah menyalurkan

---

<sup>20</sup>Gaby Firdha Aldila, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga, dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No. 1 Juni 2012, h. 81-88

<sup>21</sup>Maya Puspitasari, *Determinan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia*, Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Edisi 2, 2018, h. 195-206



pembiayaan UMKMnya melalui BPRS dan BMT yang dapat menyentuh langsung pelaku usaha UMKM.<sup>22</sup>

Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihan bank syariah yang harus memenuhi prinsip syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Salah satu alasannya adalah sebagian besar masyarakat melakukan kemitraan dengan bank syariah karena produk bank syariah berdasarkan prinsip syariah (tidak mengandung riba, meisir, gharar) oleh karena itu produk dan layanan bank syariah dapat memiliki nilai tinggi karena ada *brand building activity* untuk memperkuat reputasi bank syariah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah.<sup>23</sup> Sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM yang mengharapkan perkembangan usahanya tanpa riba. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan bagi para pelaku UMKM serta membuat kebijakan yang mampu mendorong sektor UMKM di Indonesia melalui kebijakan inklusi keuangan.

---

<sup>22</sup>Muslimin Kara, *Konstruksi....*h. 319

<sup>23</sup>Rahman el-Junusi, *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, Mei 2012 h. 105

Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat tertata dengan baik. UMKM terkendala modal atau pembiayaan dari perbankan karena sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya.<sup>24</sup> Keterbatasan pengetahuan manajemen pada akhirnya akan menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan atau laporan keuangan dan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, pelatihan manajemen perlu dilakukan untuk mendorong pembiayaan yang disalurkan pada UMKM.

---

<sup>24</sup>Muslimin kara, *Kontribusi....*h. 321

<sup>25</sup>Warno, *Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang Terhadap Standar Akuntansi Keuangan entitas Tanpa Akuntan Publik (Sak Etap) Tahun 2013*, Jurnal Economica, Vol. V edisi 1, Mei 2014, h. 138

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Hasil perhitungan indeks inklusi keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018, Indonesia memiliki nilai rata-rata IIK Syariah sebesar 0,139. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masuk dalam kategori rendah selama periode penelitian. Hal ini dikarenakan hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan syariah rendah. Rata-rata indeks inklusi keuangan syariah antar provinsi di Indonesia berkisar antara 0,01-0,2 kecuali provinsi DKI Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat inklusi keuangan syariah tertinggi di antara provinsi yang lainnya dengan nilai indeks rata-rata 0,887. Sedangkan NAD masuk dalam tingkat inklusifitas sedang dengan indeks rata-rata sebesar 0,443 selama periode 2015-2018. 31 Provinsi lainnya tergolong pada tingkat inklusi keuangan syariah rendah. hanya terdapat satu provinsi dengan nilai indeks yang masuk dalam kategori tinggi di Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam hal

inklusifitas sektor keuangan syariah selama periode 2015-2018. Sedangkan secara umum, inklusi keuangan syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi *availabilitas* dan *usage*. Sementara dimensi *aksesibilitas* memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan akses dalam menjangkau jasa keuangan syariah.

2. Hasil analisis kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Artinya, ketika indeks inklusi keuangan syariah yang diukur dari tiga dimensi (*aksesibilitas*, *availabilitas* dan *usage*) naik, maka pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM cenderung meningkat. Dengan kata lain, provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan syariah yang tinggi, menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM cenderung lebih tinggi.

## 5.2 Saran

1. Baik pemerintah maupun pelaku sektor perbankan syariah bekerja sama untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan meningkatkan setiap dimensi inklusi keuangan. Penetrasi perbankan dapat

ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Ketersediaan perbankan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan *branchless banking* seperti mesin setor tunai, *mobile banking* serta memperluas agen bank (Laku Pandai) serta penggunaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inklusivitas keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

2. Dalam mengukur inklusifitas keuangan syariah pada dimensi pengukuran *availabilitas*, penelitian ini tidak menggunakan data jumlah kantor BPRS per provinsi, hanya menggunakan data jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan proxy jumlah DPK untuk mewakili jumlah rekening penduduk dewasa tiap provinsi untuk mengukur *aksesibilitas*, mengingat keterbatasan data yang dapat diperoleh. Pada penelitian berikutnya, disarankan untuk menggunakan data perbankan yang lebih lengkap serta lingkup keuangan syariah yang lebih luas diluar perbankan seperti obligasi syariah, saham syariah dan lainnya. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memasukkan beberapa indikator pengukuran pada tiap

dimensi. Seperti pada dimensi *availabilitas* dapat digunakan beberapa indikator seperti jumlah ATM, Jumlah tenaga kerja, dan jumlah agen bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, Gaby Firdha . 2012. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga, dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10 No. 1, 81-88
- Allen F, *et al.* 2012. *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts*, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team. World Bank : Working paper No 6290, 1-53
- Anwar, Khoirul dan Amri. 2017. *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* Vol.2 No.3, 454-462
- Bank Dunia. 2009. *Meningkatkan Akses Terhadap Jasa Keuangan di Indonesia: Ringkasan Eksekutif*. Tersediapada <http://documents.worldbank.org/>
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Bank Indonesia
- Basuki, A.T. dan Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, Jakarta: Rajawali Pers
- Cahyono *et al.* 2017. *Faktor Dominan pada Indeks Inklusi Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 1, 55-79
- Demirguc-Kunt A, dan Klapper L. 2012. *Measuring Financial Inclusion The Global Financial Index*, World Bank: Working Paper No 6025

- Destiana, Risna. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Riset Keuangandan Akuntansi, Vol. 2 Isue 1, 15-28
- Dienillah, A.A. dan Anggraeni, L. 2016. *Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18 Nomor 4, 409-430
- El-Junusi, Rahman. 2012. *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1, 91-115
- Ernawati. 2016. *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No.1, 1-18
- Fahmy et al. 2016. *Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 2, 118-135
- Gabriella, L.G. dan Goeltom, M.S. 2013. *Pengaruh pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, FE Universitas Indonesia
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana
- Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, 315-322



- Kemenkop. 2019. Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2015 – 2018. Tersedia pada: <http://www.depkop.go.id>
- Mardani, Tamara Y.M. 2016. *Analisis Fakor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah Untuk Sektor UMKM di Indonesia*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Marlina, Lina dan Rahmat, B.Z. 2018. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*, Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1, 125-135
- Menne, Firman. 2017. *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, Jakarta: Celebes Media Perkasa
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nengsih, Novia. 2015. *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, Jurnal Etikonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 14 No. 2, 221-240
- Nisa et al. 2018. *Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. 2(2), 141-152
- Puspitasari, Maya. 2018. *Determinan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia*, Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Edisi 2
- Rahmat Taufik, *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1-144

- Rifa'i, Achmad. 2017. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal HUMAN FALAH: Volume 4. No. 2, 193-217
- Salam Dz., Abdus. 2018. *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*, Al-Amwal, Volume 10, No. 1, 63-80
- Sanjaya dan Nursechafia. 2016. *Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, 281-305
- Sanjaya, I Made. 2014. *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Tesis. Institut Pertanian Bogor
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2015. *Ushul fiqh*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Sarma, M. dan Pais, J. 2010. *Financial Inclusion and Development: a Cross Country Analysis*
- Sarma, Mandira. 2012. *Index of Financial Inclusion – A measure of financial Sector Inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No. 07, 1-32
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS*, Yogyakarta: Andi
- Shihadeh et al., *Does Financial Inclusion Improve the Banks' Performance? Evidence from Jordan*, in John W. Kensinger (ed.) *Global Tensions in Financial Markets (Research in Finance, Volume 34)* Emerald Publishing Limited
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

- Suharsono, Yudi. *Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Bisa Bersinergi*, <http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi/>
- Supriyanto. 2006. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, 1-16
- Umar, Azwar Iskandar. 2017. *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 20, Nomor 1, 99-126
- Ummah *et al.* 2015. *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 4 No 1, 1-27
- Warno. 2014. *Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang Terhadap Standar Akuntansi Keuangan entitas Tanpa Akuntan Publik (Sak Etap) Tahun 2013*, *Jurnal Economica*, Vol. V edisi 1, 46-54
- World Bank, *The Global Findex Database 2017*, <https://globalfindex.worldbank.org/>

### **Website**

Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)  
Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)  
Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

### **Peraturan-peraturan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015  
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Rasio Dimensi Aksesibilitas, Availabilitas dan Usage 2015-2018

Rasio/Dimensi ( <i>D</i> )												
Provinsi	Aksesibilitas ( <i>D<sub>1</sub></i> )				Availabilitas ( <i>D<sub>2</sub></i> )				Usage ( <i>D<sub>3</sub></i> )			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Jawa Barat	0,811	0,897	1,013	1,132	1,080	1,020	0,970	0,960	1,959	1,935	1,912	1,879
Banten	0,768	0,840	1,299	1,464	1,340	1,170	1,100	1,100	1,316	1,359	1,470	1,588
DKI Jakarta	14,780	17,409	20,664	22,089	4,170	3,940	3,600	3,590	4,474	4,666	5,112	5,299
DI Yogyakarta	1,356	1,483	1,727	1,974	2,220	2,020	2,030	2,010	2,934	2,811	3,024	3,509
Jawa Tengah	0,510	0,623	0,739	0,787	0,770	0,720	0,700	0,720	1,332	1,436	1,503	1,636
Jawa Timur	0,688	0,745	0,899	1,004	0,870	0,790	0,770	0,790	1,265	1,225	1,272	1,294
Bengkulu	0,501	0,537	0,624	0,695	1,490	1,310	1,220	1,260	1,767	1,817	1,896	2,024
Jambi	0,449	0,463	0,538	0,772	1,590	1,120	1,100	1,150	1,242	1,295	1,301	1,403
NAD	1,264	4,655	5,779	5,710	1,800	4,500	4,540	4,700	2,352	9,697	9,690	9,32
Sumatera Utara	0,890	1,074	1,220	1,300	1,360	1,120	1,060	1,090	1,447	1,490	1,475	1,513
Sumatera Barat	0,793	0,924	1,013	1,133	1,730	1,520	1,470	1,370	2,058	1,940	1,754	1,773
Riau	0,894	0,965	1,158	1,327	1,640	1,310	1,230	1,240	0,556	0,638	0,740	0,794
Sumatera Selatan	0,735	0,780	0,875	1,068	1,340	1,080	1,080	1,080	1,232	1,213	1,429	1,589
Bangka Belitung	0,630	0,953	0,999	1,051	1,300	1,170	1,050	0,840	0,992	1,236	1,119	1,168
Kepulauan Riau	0,323	0,514	0,456	0,472	0,780	0,710	0,670	0,670	1,293	1,687	1,694	1,605
Lampung	0,348	0,422	0,437	0,474	0,800	0,740	0,720	0,720	0,910	0,893	0,957	1,019
Kalimantan Selatan	1,078	1,169	1,579	1,754	1,890	1,720	1,720	1,660	2,314	2,648	3,068	2,685
Kalimantan Barat	0,554	0,641	0,690	0,786	1,090	1,040	1,030	1,040	2,045	2,328	2,307	2,295
Kalimantan Timur	1,299	1,344	1,524	1,793	2,190	2,150	2,100	2,150	0,818	0,850	0,762	0,746
Kalimantan Tengah	0,388	0,369	0,386	0,439	0,840	0,650	0,580	0,570	0,751	0,696	0,949	0,928
Sulawesi Tengah	0,378	0,369	0,409	0,442	0,980	0,770	0,750	0,790	0,871	0,853	0,923	0,909
Sulawesi Selatan	0,648	0,657	0,698	0,792	1,130	1,040	1,060	1,070	1,720	1,575	1,426	1,383
Sulawesi Utara	0,139	0,119	0,130	0,159	0,670	0,440	0,430	0,380	0,487	0,417	0,413	0,403
Gorontalo	0,265	0,261	0,262	0,271	1,110	0,720	0,590	0,700	0,604	0,913	0,785	0,681
Sulawesi Barat	0,198	0,182	0,204	0,247	0,460	0,450	0,440	0,540	0,944	0,494	0,579	0,697
Sulawesi Tenggara	0,374	0,385	0,439	0,522	1,080	1,050	1,090	1,010	0,926	0,886	0,917	0,9
NTB	0,409	0,472	0,567	1,944	1,300	1,220	1,170	2,060	1,996	2,067	2,681	6,091
Bali	0,256	0,266	0,340	0,396	0,800	0,690	0,710	0,700	0,860	0,870	0,757	0,724
NTT	0,035	0,034	0,032	0,036	0,120	0,120	0,120	0,110	0,281	0,219	0,172	0,17
Maluku	0,278	0,308	0,296	0,320	0,440	0,430	0,430	0,420	0,281	0,295	0,381	0,43
Papua	0,275	0,276	0,255	0,266	0,410	0,310	0,310	0,300	0,336	0,295	0,255	0,228
Maluku Utara	0,497	0,504	0,569	0,651	0,780	0,760	1,110	1,080	0,766	0,769	0,900	1,039
Papua Barat	0,489	0,542	0,508	0,522	0,660	0,640	0,630	0,610	0,237	0,229	0,200	0,164
MIN	0,035	0,034	0,032	0,036	0,120	0,120	0,120	0,110	0,237	0,219	0,172	0,164
MAX	14,780	17,409	20,664	22,089	4,170	4,500	4,540	4,700	4,474	9,697	9,690	9,320
AVERAGE	<b>1,009</b>	<b>1,248</b>	<b>1,464</b>	<b>1,630</b>	<b>1,219</b>	<b>1,165</b>	<b>1,139</b>	<b>1,166</b>	<b>1,314</b>	<b>1,568</b>	<b>1,631</b>	<b>1,754</b>
STD	2,494	3,005	3,584	3,806	0,732	0,910	0,884	0,916	0,882	1,719	1,760	1,882

## Lampiran 2. Nilai Indeks Dimensi *Aksesibilitas*, *Availabilitas* dan *Usage* 2015-2018

Indeks Dimensi ( <i>d</i> )												
Provinsi	<i>Aksesibilitas</i> ( <i>d<sub>1</sub></i> )				<i>Availabilitas</i> ( <i>d<sub>2</sub></i> )				<i>Usage</i> ( <i>d<sub>3</sub></i> )			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Jawa Barat	0,055	0,052	0,049	0,051	0,129	0,113	0,107	0,102	0,219	0,100	0,099	0,101
Banten	0,052	0,048	0,063	0,066	0,161	0,130	0,121	0,117	0,147	0,070	0,076	0,085
DKI Jakarta	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,438	0,396	0,382	0,500	0,241	0,264	0,284
DI Yogyakarta	0,092	0,085	0,084	0,089	0,266	0,224	0,224	0,214	0,328	0,145	0,156	0,188
Jawa Tengah	0,035	0,036	0,036	0,036	0,092	0,080	0,077	0,077	0,149	0,074	0,078	0,088
Jawa Timur	0,047	0,043	0,044	0,045	0,104	0,088	0,085	0,084	0,141	0,063	0,066	0,069
Bengkulu	0,034	0,031	0,030	0,031	0,179	0,146	0,134	0,134	0,197	0,094	0,098	0,109
Jambi	0,030	0,027	0,026	0,035	0,191	0,124	0,121	0,122	0,139	0,067	0,067	0,075
NAD	0,086	0,267	0,280	0,258	0,216	0,500	0,500	0,500	0,263	0,500	0,500	0,500
Sumatera Utara	0,060	0,062	0,059	0,059	0,163	0,124	0,117	0,116	0,162	0,077	0,076	0,081
Sumatera Barat	0,054	0,053	0,049	0,051	0,207	0,169	0,162	0,146	0,230	0,100	0,091	0,095
Riau	0,060	0,055	0,056	0,060	0,197	0,146	0,135	0,132	0,062	0,033	0,038	0,043
Sumatera Selatan	0,050	0,045	0,042	0,048	0,161	0,120	0,119	0,115	0,138	0,063	0,074	0,085
Bangka Belitung	0,043	0,055	0,048	0,048	0,156	0,130	0,116	0,089	0,111	0,064	0,058	0,063
Kepulauan Riau	0,022	0,030	0,022	0,021	0,094	0,079	0,074	0,071	0,145	0,087	0,087	0,086
Lampung	0,024	0,024	0,021	0,021	0,096	0,082	0,079	0,077	0,102	0,046	0,049	0,055
Kalimantan Selatan	0,073	0,067	0,076	0,079	0,227	0,191	0,189	0,177	0,259	0,137	0,158	0,144
Kalimantan Barat	0,037	0,037	0,033	0,036	0,131	0,116	0,113	0,111	0,229	0,120	0,119	0,123
Kalimantan Timur	0,088	0,077	0,074	0,081	0,263	0,239	0,231	0,229	0,091	0,044	0,039	0,040
Kalimantan Tengah	0,026	0,021	0,019	0,020	0,101	0,072	0,064	0,061	0,084	0,036	0,049	0,050
Sulawesi Tengah	0,026	0,021	0,020	0,020	0,118	0,086	0,083	0,084	0,097	0,044	0,048	0,049
Sulawesi Selatan	0,044	0,038	0,034	0,036	0,135	0,116	0,117	0,114	0,192	0,081	0,074	0,074
Sulawesi Utara	0,009	0,007	0,006	0,007	0,080	0,049	0,047	0,040	0,054	0,022	0,021	0,022
Gorontalo	0,018	0,015	0,013	0,012	0,133	0,080	0,065	0,074	0,068	0,047	0,041	0,037
Sulawesi Barat	0,013	0,010	0,010	0,011	0,055	0,050	0,048	0,057	0,105	0,025	0,030	0,037
Sulawesi Tenggara	0,025	0,022	0,021	0,024	0,129	0,117	0,120	0,107	0,103	0,046	0,047	0,048
NTB	0,028	0,027	0,027	0,088	0,156	0,136	0,129	0,219	0,223	0,107	0,138	0,327
Bali	0,017	0,015	0,016	0,018	0,096	0,077	0,078	0,074	0,096	0,045	0,039	0,039
NTT	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014	0,013	0,013	0,012	0,031	0,011	0,009	0,009
Maluku	0,019	0,018	0,014	0,014	0,053	0,048	0,047	0,045	0,031	0,015	0,020	0,023
Papua	0,019	0,016	0,012	0,012	0,049	0,034	0,034	0,032	0,038	0,015	0,013	0,012
Maluku Utara	0,034	0,029	0,028	0,029	0,094	0,084	0,122	0,115	0,086	0,040	0,046	0,056
Papua Barat	0,033	0,031	0,025	0,024	0,079	0,071	0,069	0,065	0,026	0,012	0,010	0,009
MIN	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014	0,013	0,013	0,012	0,026	0,011	0,009	0,009
MAX	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>AVERAGE</b>	<b>0,068</b>	<b>0,072</b>	<b>0,071</b>	<b>0,074</b>	<b>0,146</b>	<b>0,129</b>	<b>0,125</b>	<b>0,124</b>	<b>0,147</b>	<b>0,081</b>	<b>0,084</b>	<b>0,094</b>
STD	0,169	0,173	0,173	0,172	0,088	0,101	0,097	0,097	0,099	0,089	0,091	0,101

## Lampiran 3. Indeks Inklusi Keuangan Syariah 33 Provinsi di Indonesia 2015-2018

Indeks Inklusi keuangan												
Provinsi	X1				X2				IIK Syariah			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Jawa Barat	0,212	0,130	0,125	0,124	0,140	0,102	0,098	0,099	0,176	0,116	0,112	0,112
Banten	0,183	0,127	0,127	0,130	0,129	0,095	0,105	0,109	0,156	0,111	0,116	0,120
DKI Jakarta	1,000	0,913	0,904	0,904	1,000	0,782	0,789	0,799	1,000	0,847	0,847	0,852
DI Yogyakarta	0,353	0,229	0,233	0,244	0,221	0,168	0,170	0,180	0,287	0,198	0,201	0,212
Jawa Tengah	0,146	0,094	0,094	0,099	0,098	0,074	0,074	0,077	0,122	0,084	0,084	0,088
Jawa Timur	0,148	0,095	0,094	0,096	0,108	0,077	0,078	0,080	0,128	0,086	0,086	0,088
Bengkulu	0,219	0,144	0,138	0,143	0,133	0,094	0,092	0,096	0,176	0,119	0,115	0,120
Jambi	0,194	0,117	0,115	0,121	0,118	0,078	0,076	0,086	0,156	0,097	0,096	0,103
NAD	0,286	0,617	0,621	0,615	0,194	0,402	0,412	0,395	0,240	0,510	0,516	0,505
Sumatera Utara	0,194	0,130	0,124	0,125	0,139	0,105	0,101	0,102	0,167	0,117	0,112	0,114
Sumatera Barat	0,257	0,166	0,157	0,148	0,162	0,118	0,111	0,110	0,209	0,142	0,134	0,129
Riau	0,175	0,130	0,124	0,123	0,118	0,092	0,092	0,095	0,147	0,111	0,108	0,109
Sumatera Selatan	0,177	0,116	0,119	0,123	0,125	0,088	0,089	0,096	0,151	0,102	0,104	0,110
Bangka Belitung	0,160	0,126	0,113	0,097	0,111	0,098	0,088	0,081	0,135	0,112	0,100	0,089
Kepulauan Riau	0,142	0,099	0,095	0,093	0,088	0,073	0,066	0,064	0,115	0,086	0,081	0,079
Lampung	0,116	0,079	0,078	0,079	0,078	0,057	0,055	0,057	0,097	0,068	0,067	0,068
Kalimantan Selatan	0,287	0,199	0,211	0,197	0,187	0,145	0,157	0,152	0,237	0,172	0,184	0,174
Kalimantan Barat	0,217	0,139	0,137	0,138	0,130	0,098	0,095	0,097	0,173	0,119	0,116	0,118
Kalimantan Timur	0,238	0,208	0,201	0,201	0,161	0,133	0,127	0,132	0,200	0,170	0,164	0,167
Kalimantan Tengah	0,109	0,068	0,067	0,066	0,076	0,049	0,049	0,049	0,093	0,059	0,058	0,058
Sulawesi Tengah	0,126	0,080	0,080	0,081	0,084	0,056	0,055	0,056	0,105	0,068	0,067	0,068
Sulawesi Selatan	0,195	0,119	0,116	0,115	0,128	0,087	0,083	0,083	0,161	0,103	0,099	0,099
Sulawesi Utara	0,080	0,044	0,043	0,038	0,049	0,027	0,027	0,025	0,064	0,036	0,035	0,031
Gorontalo	0,123	0,077	0,063	0,068	0,074	0,051	0,043	0,044	0,098	0,064	0,053	0,056
Sulawesi Barat	0,098	0,047	0,047	0,057	0,059	0,032	0,032	0,038	0,079	0,039	0,040	0,047
Sulawesi Tenggara	0,137	0,104	0,107	0,098	0,089	0,066	0,066	0,065	0,113	0,085	0,087	0,082
NTB	0,223	0,143	0,156	0,329	0,128	0,093	0,100	0,208	0,176	0,118	0,128	0,269
Bali	0,112	0,074	0,073	0,070	0,072	0,049	0,049	0,048	0,092	0,061	0,061	0,059
NTT	0,028	0,014	0,013	0,012	0,017	0,009	0,008	0,008	0,022	0,012	0,011	0,010
Maluku	0,052	0,043	0,043	0,043	0,040	0,032	0,031	0,032	0,046	0,038	0,037	0,037
Papua	0,053	0,033	0,032	0,030	0,041	0,027	0,024	0,023	0,047	0,030	0,028	0,026
Maluku Utara	0,107	0,080	0,109	0,107	0,080	0,059	0,071	0,074	0,093	0,069	0,090	0,090
Papua Barat	0,073	0,064	0,061	0,057	0,056	0,047	0,042	0,039	0,065	0,056	0,051	0,048
MIN	0,028	0,014	0,013	0,012	0,017	0,009	0,008	0,008	0,022	0,012	0,011	0,010
MAX	1,000	0,913	0,904	0,904	1,000	0,782	0,789	0,799	1,000	0,847	0,847	0,852
AVERAGE	<b>0,189</b>	<b>0,147</b>	<b>0,146</b>	<b>0,151</b>	<b>0,134</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	<b>0,112</b>	<b>0,161</b>	<b>0,127</b>	<b>0,127</b>	<b>0,131</b>
STD	0,163	0,171	0,170	0,173	0,162	0,138	0,140	0,142	0,162	0,154	0,155	0,157

## Lampiran 4. Data Penelitian

		<i>IKI</i>	<i>Pembiayaan UMKM</i>	<i>Log_IKSyariah</i>	<i>Log_PembUMKM</i>
2015	1	0,18	10.157,31	-0,75	4,01
	2	0,16	2.093,28	-0,81	3,32
	3	1	10.701,34	0	4,03
	4	0,29	1.110,47	-0,54	3,05
	5	0,12	5.105,61	-0,91	3,71
	6	0,13	6.315,81	-0,89	3,8
	7	0,18	480,59	-0,75	2,68
	8	0,16	847,27	-0,81	2,93
	9	0,24	595,5	-0,62	2,77
	10	0,17	3.088,29	-0,78	3,49
	11	0,21	1.284,15	-0,68	3,11
	12	0,15	1.251,43	-0,83	3,1
	13	0,15	1.390,62	-0,82	3,14
	14	0,14	390,07	-0,87	2,59
	15	0,12	423,7	-0,94	2,63
	16	0,1	1.068,08	-1,01	3,03
	17	0,24	914,34	-0,63	2,96
	18	0,17	927,57	-0,76	2,97
	19	0,2	1.370,14	-0,7	3,14
	20	0,09	217,92	-1,03	2,34
	21	0,11	276,44	-0,98	2,44
	22	0,16	1.461,12	-0,79	3,16
	23	0,06	173,93	-1,19	2,24
	24	0,1	74,67	-1,01	1,87
	25	0,08	20,75	-1,1	1,32
	26	0,11	265,48	-0,95	2,42
	27	0,18	792,8	-0,75	2,9
	28	0,09	310,06	-1,04	2,49
	29	0,02	73,02	-1,66	1,86
	30	0,05	30,95	-1,34	1,49
	31	0,05	179,11	-1,33	2,25
	32	0,09	69,75	-1,03	1,84
	33	0,07	63,77	-1,19	1,8
2016	1	0,12	10.859,06	-0,94	4,04
	2	0,11	2.121,18	-0,95	3,33
	3	0,85	11.752,26	-0,07	4,07

	4	0,2	1.282,02	-0,7	3,11
	5	0,08	6.250,89	-1,08	3,8
	6	0,09	7.191,42	-1,07	3,86
	7	0,12	502,25	-0,92	2,7
	8	0,1	819,66	-1,01	2,91
	9	0,51	1.728,47	-0,29	3,24
	10	0,12	3.392,24	-0,93	3,53
	11	0,14	1.292,38	-0,85	3,11
	12	0,11	1.313,87	-0,95	3,12
	13	0,1	1.406,34	-0,99	3,15
	14	0,11	590,15	-0,95	2,77
	15	0,09	512,14	-1,07	2,71
	16	0,07	1.406,73	-1,17	3,15
	17	0,17	899,81	-0,76	2,95
	18	0,12	1.468,67	-0,92	3,17
	19	0,17	1.131,95	-0,77	3,05
	20	0,06	233,99	-1,23	2,37
	21	0,07	273,14	-1,17	2,44
	22	0,1	1.574,55	-0,99	3,2
	23	0,04	142,79	-1,44	2,15
	24	0,06	64,79	-1,19	1,81
	25	0,04	14,57	-1,41	1,16
	26	0,09	268,68	-1,07	2,43
	27	0,12	957,13	-0,93	2,98
	28	0,06	371,44	-1,21	2,57
	29	0,01	65,49	-1,92	1,82
	30	0,04	25,32	-1,42	1,4
	31	0,03	165,68	-1,52	2,22
	32	0,07	82,37	-1,16	1,92
	33	0,06	73,51	-1,25	1,87
2017	1	0,11	10.062,35	-0,95	4
	2	0,12	2.129,62	-0,94	3,33
	3	0,85	15.398,18	-0,07	4,19
	4	0,2	1.148,30	-0,7	3,06
	5	0,08	5.920,69	-1,08	3,77
	6	0,09	7.354,90	-1,07	3,87
	7	0,12	525,14	-0,94	2,72
	8	0,1	715,37	-1,02	2,85
	9	0,52	1.752,54	-0,29	3,24



	10	0,11	3.397,70	-0,95	3,53
	11	0,13	1.303,58	-0,87	3,12
	12	0,11	1.291,37	-0,97	3,11
	13	0,1	1.494,15	-0,98	3,17
	14	0,1	411,74	-1	2,61
	15	0,08	381,69	-1,09	2,58
	16	0,07	1.271,56	-1,17	3,1
	17	0,18	1.027,10	-0,74	3,01
	18	0,12	1.594,58	-0,94	3,2
	19	0,16	1.343,17	-0,79	3,13
	20	0,06	233,62	-1,24	2,37
	21	0,07	232,08	-1,17	2,37
	22	0,1	1.541,37	-1	3,19
	23	0,04	130,55	-1,46	2,12
	24	0,05	49,85	-1,28	1,7
	25	0,04	16,91	-1,4	1,23
	26	0,09	266,46	-1,06	2,43
	27	0,13	924	-0,89	2,97
	28	0,06	482,2	-1,21	2,68
	29	0,01	54,83	-1,96	1,74
	30	0,04	14,92	-1,43	1,17
	31	0,03	155,17	-1,55	2,19
	32	0,09	68,28	-1,05	1,83
	33	0,05	53,27	-1,29	1,73
2018	1	0,11	9.708,49	-0,95	3,99
	2	0,12	1.858,55	-0,92	3,27
	3	0,85	18.744,18	-0,07	4,27
	4	0,21	1.188,57	-0,67	3,08
	5	0,09	5.872,21	-1,06	3,77
	6	0,09	7.683,86	-1,06	3,89
	7	0,12	514,08	-0,92	2,71
	8	0,1	643,75	-0,99	2,81
	9	0,51	1.726,83	-0,3	3,24
	10	0,11	3.405,68	-0,94	3,53
	11	0,13	1.286,13	-0,89	3,11
	12	0,11	1.315,63	-0,96	3,12
	13	0,11	1.639,88	-0,96	3,21
	14	0,09	466,16	-1,05	2,67
	15	0,08	335,15	-1,1	2,53

	16	0,07	1.237,06	-1,17	3,09
	17	0,17	919,55	-0,76	2,96
	18	0,12	1.781,99	-0,93	3,25
	19	0,17	1.477,38	-0,78	3,17
	20	0,06	268,93	-1,24	2,43
	21	0,07	220,45	-1,17	2,34
	22	0,1	1.258,10	-1	3,1
	23	0,03	114,5	-1,51	2,06
	24	0,06	35,28	-1,25	1,55
	25	0,05	14,21	-1,33	1,15
	26	0,08	273,62	-1,09	2,44
	27	0,27	1.544,17	-0,57	3,19
	28	0,06	463,71	-1,23	2,67
	29	0,01	59,04	-2	1,77
	30	0,04	14,31	-1,43	1,16
	31	0,03	137,52	-1,59	2,14
	32	0,09	72,71	-1,05	1,86
	33	0,05	33,62	-1,32	1,53

## BIODATA MAHASISWA



Nama : Novatul Isrowiyah  
Tampat, Tgl Lahir : Pati, 30 November 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pundenrejo RT 02/05 Kecamatan  
Tayu Kabupaten Pati  
Handphone/WA : 089669372529  
Email : Novaisrowy@gmail.com  
Instagram : Novaisrowy  
Facebook : Nova Isrowy

## PENDIDIKAN

### FORMAL:

- ☐ 2002 - 2009 MI Mabdaul Huda Kedungbang
- ☐ 2009 - 2012 MTs. Manba'ul Huda Pundenrejo
- ☐ 2012 – 2015 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Pati

### NON FORMAL:

- ☐ TPQ Sendang Lestari Kedungbang

## PENGALAMAN ORGANISASI

- ☐ 2016/2017: Anggota KMPP (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati )

- 2016/2017 :Pengurus Bidikmisi Community (BMC)  
Walisongo
- 2017/2018 :Pengurus KJKS Bidikmisi Community  
(BMC) Walisongo